



ANALISIS COST EFFECTIVENESS PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KOTA BOGOR



**Ikeu Tanziha
Dadang Sukandar**



**DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2009**

**ANALISIS COST EFFEKTIFNESS PROGRAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DI KOTA BOGOR**

Oleh:

**Dr. Ir. IKEU TANZIHA, MS
Dr. Ir. DADANG SUKANDAR, M.Sc**

**DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2009**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas izin-Nyalah, kami peneliti dapat menyelesaikan tulisan yang berjudul "Analisis Cost effectiveness Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". Tulisan ini merupakan bahasan yang rinci dari penelitian yang dilakukan. Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis *cost effectiveness* dari berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan, untuk membantu membuat keputusan perencanaan program pemberdayaan ekonomi selanjutnya di Kota Bogor. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi keragaan program terkait pemberdayaan masyarakat Kota Bogor.
2. Menghitung *unit cost* dari berbagai program pemberdayaan masyarakat.
3. Menganalisis potensi kehilangan PDRB yang dapat dicegah.
4. Menganalisis *cost effectiveness*.
5. Mengkategorikan berbagai program pemberdayaan masyarakat pada dua kategori *cost effectiveness* (tidak *cost effectiveness* dan *cost effectiveness*).

Terimakasih disampaikan kepada berbagai pihak yang bekerjasama membantu jalannya penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perencana program pemberdayaan masyarakat agar dapat memilih program pemberdayaan masyarakat yang efektivitas dan tingkat keberhasilannya tinggi.

Bogor, April 2009

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN.....	viii

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Tujuan	
1.3.1. Tujuan Khusus.....	3
1.3.2. Tujuan Umum	3
1.4. Keluaran	3

II. METODE PENELITIAN

2.1 Desain, Tempat dan waktu	5
2.2 Teknik Penarikan contoh	5
2.3 Jenis dan Cara Pengambilan Data	6
2.4 Pengolahan dan Analisis Data	7
2.4.1. Pengolahan Data.....	7
2.4.2. Analisis Cost Effectiveness Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	8
2.5. Keterbatasan Data	10
2.6. Metode Penyusunan	10

III. KEADAAN UMUM KOTA BOGOR

3.1. Kondisi Geografis Kota Bogor	11
3.1.1. Topografi.....	15
3.1.2. Penggunaan Lahan	15
3.2. Sarana Transportasi Jalan	17
3.3. Kawasan Kumuh	17
3.4. Kondisi Perekonomian.....	18
3.5. Industri	19
3.6. Pertanian.....	20
3.6.1. Peternakan	23
3.6.2. Pertanian	24
3.6.3. Konsumsi.....	27
3.7. Masalah Kemiskinan	28
3.7.1 Penanganan Masalah Dasar	29

IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

4.1. Konsep Program Dakalabarea	32
4.1.1. Dasar Hukum	33

4.1.2. Sasaran.....	33
4.1.3. Prinsip-prinsip Kredit Program Dakabalaera ...	34
4.1.4. Indikator-indikator Keberhasilan Program Kredit Dakabalaera.....	35
4.2. Konsep Program Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Garda Emas)	36
4.2.1. Tujuan	36
4.2.2. Sasaran Program	36
4.2.3. Indikator Keberhasilan	37
4.3. Konsep Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)	38
4.3.1. Prinsip.....	38
4.3.2. Tujuan	39
4.3.4. Strategi.....	40
4.3.5. Kelompok Sasaran	42
4.3.6. Pendampingan Peningkatan Peran dan Kapasitas Pemda	43
4.3.7. Indikator Keberhasilan.....	45
4.4. Konsep Program Kelompok Usaha bersama Keluarga Miskin (KUBE)	45
4.4.1. Tujuan	46
4.4.2. Sasaran.....	46
4.4.3. Proses Pembentukan KUBE.....	47
4.4.4. Organisasi dan Manajemen.....	48
4.4.5. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi	49
4.4.6. Dana Stimulan.....	50
4.4.7. Indikator Keberhasilan.....	51

V. KONDISI SAATINI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARKAT DI KOTA

5.1. Program Dakabalaera	51
5.1.1. Total Dana yang Digunakan.....	52
5.1.2. Jumlah Penerima Program	54
5.2. Program Garda Emas.....	54
5.2.1. Total Dana yang Digunakan.....	54
5.2.2. Jumlah Penerima Program	54
5.3. Program P2KP	55
5.3.1. Total Dana yang Digunakan	55
5.3.2. Jumlah Penerima Program	55
5.4. Program KUBE.....	56
5.4.1. Total Dana yang Digunakan	56
5.4.2. Jumlah Penerima Program	57

VI. KERAGAAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM

6.1. Karakteristik Penerima Manfaat Program.....	58
6.2. Keragaan Usaha Penerima Manfaat Program.....	61
6.2.1. Input	61
6.2.2. Output	73
6.3. Indikator Keberhasilan ProgramKualitatif	78

VII. COST EFFECTIVENESS PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

7.1. Program Dakabalaera	79
7.2. Program Garda Emas.....	79
7.3. Program P2KP	80
7.4. Program KUBE.....	80

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN

8.1. Kesimpulan	83
8.2. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Jumlah penduduk Kota Bogor berdasarkan kecamatan tahun 2006	12
Tabel 3.2.	Kemiringan lereng berdasarkan luas lahan	15
Tabel 3.3.	Persentase luasan penggunaan lahan.....	16
Tabel 3.4.	Target dan realisasi tanaman padi, palawija dan Hortikultura	21
Tabel 3.5.	Target dan realisasi tanaman padi, palawija dan Hortikultura	22
Tabel 3.6.	Jumlah RTP pembudidaya di kolam air tenang Kota Bogor tahun 2003.....	24
Tabel 3.7.	Jumlah RTP di kolam air deras Kota Bogor tahun 2003.....	25
Tabel 3.8	Jumlah RTP pembudidaya di sawah Kota Bogor tahun 2003.....	26
Tabel 3.9	Jumlah RTP pembudidaya di keramba Kota Bogor tahun 2003	26
Tabel 3.10	Kebutuhan dan pemenuhan komsumsi bahan pangan masyarakat Kota Bogor tahun 2003.....	27
Tabel 4.1.	Ketentuan bantuan teknis	43
Tabel 4.2.	Penumbuhan dan pengembangan KUBE.....	49
Tabel 5.1.	Keragaan program dakabalarea, garda emas, P2KP, dan KUBE	52
Tabel 6.1.	Statistik umur penerima program	59
Tabel 6.2.	Sebaran responden menurut jenis usaha	62
Tabel 6.3.	Sebaran responden menurut ya atau tidak modal....	63
Tabel 6.4.	Statistik besar modal yang diterima penerima program	65
Tabel 6.5.	Sebaran responden menurut ya atau tidak kembali modal yang dipinjam	65
Tabel 6.6.	Statistik persen bungan dari modal.....	66
Tabel 6.7.	Statistik lama pendampingan penerima program....	68
Tabel 6.8.	Sebaran responden menurut ya atau tidak kembalikan modal	68

Tabel 6.9. Statistik lama bulan pengembalian modal	69
Tabel 6.10. Jenis alasan tidak lunas pengembalian modal usaha	70
Tabel 6.11. Statistik besarnya modal kedua yang diterima.....	72
Tabel 6.12. Statistik lama cicilan modal kedua yang diterima	72
Tabel 6.13. Sebaran responden menurut tingkat pelunasan modal usaha	73
Tabel 6.14. Statistik besarnya omset.....	74
Tabel 6.15. Statistik peningkatan omset	75
Tabel 6.16. Statistik untung	76
Tabel 6.17. Sebaran responden menurut variabel indikator keberhasilan	78
Tabel 7.1. Evaluasi program perbaikan ekonomi masyarakat ...	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Perkembangan KK miskin di Kota Bogor	2
Gambar 4.1.	Siklus dasar P2KP.....	44
Gambar 4.2.	Pendekatan KUBE dalam Penanggulangan Kemiskinan	46
Gambar 6.1.	Persentase responden menurut program yang diterima	58
Gambar 6.2.	Persentase responden menurut jenis kelamin.....	59
Gambar 6.3.	Persentase responden menurut status dalam keluarga	60
Gambar 6.4.	Persentase responden menurut tingkat pendidikan	61
Gambar 6.5.	Persentase responden berdasar status usaha di awal program	62
Gambar 6.6.	Persentase responden menurut ada atau tidak ada pelatihan	63
Gambar 6.7.	Persentase responden menurut ya atau tidak ikut pelatihan	64
Gambar 6.8.	Persentase responden menurut ada atau tidaknya bunga	65
Gambar 6.9.	Persentase responden menurut ada atau tidaknya pendampingan	67
Gambar 6.10.	Persentase responden menurut lunas tidaknya cicilan modal bergulir	70
Gambar 6.11.	Persentase responden menurut ya atau tidaknya peminjaman modal lagi.....	71
Gambar 6.12.	Persentase responden menurut ya 74 atau tidak usahanya berjalan	74
Gambar 6.13.	Persentase responden menurut ada tidaknya peningkatan omset	75
Gambar 6.15.	Persentase responden menurut aktif tidaknya menabung	77
Gambar 6.16.	Persentase responden menurut ada tidaknya pengembangan usaha	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Kota Bogor.....	89
Lampiran 2. Sebaran responden menurut kelompok usaha dakabalaera	90
Lampiran 4. Sebaran responden menurut kelompok usaha P2KP.....	91
Lamiran 5. Sebaran responden menurut kelompok usaha KUBE.....	92
Lampiran 6. Hasil korelasi Pearson antara besarnya modal yang diberikan dengan keuntungan yang diterima...	93
Lampiran 7. Hasil korelasi Pearson antara peningkatan Omset dan keuntungan yang diterima.....	93
Lampiran 8. Hasil korelasi Pearson antara peningkatan Omset dan keuntungan yang diterima.....	93

RINGKASAN

Analisa *cost effectiveness* adalah suatu bentuk analisa ekonomi yang menghitung dan membandingkan biaya (*cost*) dan dampak (*outcome*) dari berbagai alternatif program yang dilakukan. Dalam situasi yang terbatas, analisa *cost effectiveness* sangat perlu dilakukan untuk memperbandingkan dan mencari program alternatif yang dianggap paling *cost effectiveness*.

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah menganalisis *cost effectiveness* dari berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan, untuk membantu membuat keputusan perencanaan program pemberdayaan ekonomi selanjutnya di Kota Bogor. Sedangkan tujuan khususnya adalah: 1) Identifikasi keragaan program terkait pemberdayaan masyarakat di Kota Bogor, 2) menghitung unit *cost* dari berbagai program pemberdayaan masyarakat; 3) menganalisis potensi kehilangan PDRB yang dapat di cegah, 4) menganalisis *cost effectiveness*, dan 5) Mengkategorikan berbagai program pemberdayaan masyarakat pada 2 kategori *cost effectiveness* (tidak *cost effectiveness* dan *cost effectiveness*).

Penelitian dilakukan di semua kecamatan di Kota Bogor, di 12 kelurahan yang diambil secara acak dari masing-masing kecamatan yaitu Kelurahan Lawang Gintung dan Bojong Kerta dari Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Pasirmulya dan Cilendek Barat dari Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Katulampa dan Baranangsiang dari Kecamatan Bogor Timur, Kelurahan Ciwaringin dan Baranangsiang dari Kecamatan Bogor Timur, Kelurahan Ciwaringin dan Sempur dari Kecamatan Bogor Tengah, Kelurahan Tanah baru dan Kedunghalang dari Kecamatan Bogor Utara, serta Kelurahan Kedung Waringin dan Kedung Jaya dari Kecamatan Tanah Sareal. Penelitian dilaksanakan dari bulan April sampai dengan Nopember 2008. Contoh diambil secara acak. sebanyak 298 rumahtangga, yaitu 63 rumahtangga penerima program Dakabalarea, 84 rumahtangga penerima program Garda Emas, 76 rumahtangga penerima program P2KP, dan 75 rumahtangga penerima program KUBE. Responden adalah kepala rumahtangga atau istri yang berstatus sebagai penerima program. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari data karakteristik responden atau penerima program, keragaan usaha penerima program, dan keragaan program.

Keragaan program dari program Dakabalarea adalah total dana yang digunakan pada program Dakabalarea adalah sebesar

Rp 676.400.000, sasarannya sebanyak 243 orang, dan tingkat pengembalian modal usaha sebesar 66.29%. Pada Garda Emas total dana yang digunakan pada program Garda Emas adalah sebesar Rp 534.350.000, sasarannya sebanyak 553 orang, dan tingkat pengembalian sebesar 80.57%. Pada program P2KP total dana yang digunakan sebesar Rp 12.058.154.700, sasaran sebanyak 23.523 orang. Tingkat pengembalian sebesar 55%. Pada KUBE total dana yang digunakan sebesar Rp 2.550.635.700, sasaran sebanyak 11.210 KK dan tingkat pengembalian sebesar 61.35%.

Karakteristik contoh penerima program, umur responden berkisar antara 23 tahun sampai 85 tahun dengan rataan 45.7 ± 10.6 tahun, 57% adalah laki-laki, 59.38% berstatus sebagai suami, proporsi terbesar 42.24% berpendidikan SD, menyusul SMA 28.52%, SMP 24.55% dan perguruan tinggi 3.25%.

Keragaan usaha penerima program dibahas menurut sistem yaitu dari keragaan input, proses dan output. Dari segi input: 76.5% penerima program statusnya sudah punya usaha, 100% mendapat pinjaman modal usaha yang diberikan program Dakabalaera antara Rp 300.000 hingga Rp 4.000.000, pada program Garda Emas antara Rp 200.000 hingga Rp 2000.000, pada program P2KP antara Rp 200.000 hingga Rp 6.000.000, dan pada program KUBE modal usaha yang diberikan antara Rp 200.000 hingga Rp 1.200.000, dengan bunga antara 1-3% kecuali KUBE tanpa bunga.

Dari Proses: 48.13 % mengatakan ada pendampingan usaha dengan lama pendampingan mulai dari hanya 1 bulan sampai dengan 18 bulan dengan rataan 8.6 ± 4.2 bulan, pada program Dakabalaera, Garda Emas, P2KP dan KUBE masing-masing 33.3%, 32.9%, 92.9 %, 80% dapat melunasi cicilan sesuai waktu yang ditentukan. Setelah lunas 34.87% penerima program menerima modal lanjutan untuk pengembangan usaha, dengan besar modal antara Rp 120.000 hingga Rp 6.500.000, dengan rataan $Rp 1.363.600 \pm 940132.9$, dengan tingkat pengembalian mencapai 85.7%

Dari aspek output: penerima program yang usahanya masih berjalan pada program Dakabalaera 25.4%, pada Garda Emas 89.3%, pada P2KP 35.5% dan pada KUBE 72%. Rataan peningkatan omset pada program Garda Emas paling tinggi dibanding omset penerima program lainnya yaitu Rp 2.242.560 $\pm 4.845.397$, menyusul KUBE Rp 1.749.067 $\pm 3.285.169$, Dakabalaera Rp 1.432.698 $\pm 4.845.397$, dan yang paling kecil terdapat pada program P2KP yaitu Rp 1.004.539 $\pm 3.906.896$.

Penerima program yang meningkat omsetnya pada program Dakabalarea 19.0%, pada Garda Emas 72.6%, pada P2KP 30.3%, dan pada KUBE 65.3%. Rataan keuntungan tertinggi diterima oleh penerima program dari program Garda Emas yaitu Rp 733.869 ± 855.260 , menyusul dari program KUBE Rp 448.133 ± 525.037 , program P2KP Rp 282.237 ± 632.651 , dan rataan keuntungan terkecil diterima oleh penerima program Dakabalarea Rp 275.556 ± 845.433 . Berdasarkan hasil analisis korelasi *Pearson* menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang nyata antara besarnya modal yang diberikan dengan besarnya keuntungan usaha, namun ada hubungan nyata antara omset yang diterima dengan keuntungan.

Pada program Garda Emas, sebagian besar (72.6%) penerima program mempunyai tabungan, pada program Dakabalarea, P2KP maupun KUBE masing-masing sebesar hanya 23.8%, 21.1% dan 32.0%. Proporsi terbesar penerima program yang melakukan pengembangan usaha ada pada program Garda Emas yaitu (34.5%), menyusul penerima program dari KUBE (29.3%), Dakabalarea (17.5%) dan yang paling sedikit pada program P2KP (14.5%).

Hasil analisis cost effectiveness menunjukkan bahwa pada program **Dakabalarea** nilai **$1/CE=16.72>1$** atau setiap **Rp 1 rupiah** yang digunakan melalui program Dakabalarea dapat memberikan **Rp 16.72 bagi PDB**. Pada program Garda Emas nilai **$1/CE=61.72>1$** atau setiap Rp 1 rupiah yang digunakan melalui program **Garda Emas dapat memberikan Rp 61.72 bagi PDB**. Pada program P2KP nilai **$1/CE=78.15>1$** atau setiap Rp 1 rupiah yang digunakan melalui program **P2KP dapat memberikan Rp 78.15 bagi PDB**. Pada program Kube sangat efektif karena nilai **$1/CE=252.96>1$** atau setiap Rp 1 rupiah yang digunakan melalui program **Kube dapat memberikan Rp 252.96 bagi PDB**.

Kesimpulan analisis cost effectiveness menunjukkan bahwa semua program tergolong efektif hanya dengan tingkat efektifitas yang berbeda. Yang paling rendah efektifitasnya adalah program Dakabalarea, dan yang paling tinggi efektifitasnya adalah program KUBE.

Oleh karena itu disarankan untuk meneruskan program **Kube, P2KP dan Garda Emas** untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Program Kube dapat diprioritaskan karena memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDB. Program **Dakabalarea** hendaknya dipertimbangkan lebih dahulu apabila akan diteruskan untuk pemberdayaan masyarakat karena efektivitasnya terendah dan tingkat keberhasilannya pun terendah.

Pertimbangan yang harus dilakukan dalam hal perbaikan mekanisme pergulirannya serta meningkatkan efektifitas pendampingan (jumlah dan frekuensi), karena keberhasilan usaha penerima program berhubungan dengan efektifitas pendampingan artinya Semakin efektif pendampingan maka keberlangsungan usaha penerima program semakin tinggi dan juga semakin baik keuntungan atau peningkatan pendapatan usaha yang dijalankan penerima program.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah serius yang banyak dihadapi oleh negara berkembang. Banyaknya masalah yang dihadapi saat ini baik di bidang sosial maupun kesehatan berakar pada kemiskinan. Lingkaran setan dari kemiskinan apabila tidak segera diputus maka akan selalu menghasilkan generasi selanjutnya yang miskin pula. Kemiskinan pada ujungnya akan menghambat pembangunan.

Pendidikan rendah, produktivitas rendah, pengangguran merupakan diantara akar masalah terjadinya kemiskinan. Ditambah kurang stabilnya ekonomi saat ini, tingginya PHK menyebabkan semakin melebarnya kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Daya beli kelompok miskin semakin terpuruk dengan semakin meningkatnya harga kebutuhan sehari-hari. Kemampuan untuk menyediakan pangan dan pendidikan yang layak juga semakin menurun. Sebagai konsekwensi dari masalah tersebut, status gizi masyarakat semakin terpuruk, semakin tinggi pengeluaran kesehatan masyarakat dan semakin tinggi pula beban pemerintah.

Kenyataan saat ini di Kota Bogor, menunjukkan bahwa jumlah KK miskin naik turun dan ada kecenderungan terus meningkat. Perkembangan KK miskin dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Dari Gambar 1.1 terlihat bahwa persentase KK miskin di Kota Bogor menurun terus sampai tahun 2003 yaitu dari 20.33% pada tahun 1999 menjadi 10.27% pada tahun 2003. Tetapi pada tahun 2004 terjadi peningkatan menjadi 14.83%, bahkan pada tahun 2005 terjadi peningkatan yang sangat tinggi menjadi 23.05% atau satu diantara 5 rumah tangga di Kota Bogor adalah rumah tangga miskin. Meskipun pada tahun 2006 terjadi penurunan yaitu menjadi 21.30%, tetapi penurunan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan persentasi KK miskin masih jauh diatas rata-rata persentase KK miskin Nasional sebesar 17%.



Sumber: Profil Kemiskinan Kota Bogor tahun 2007

Gambar 1.1 Perkembangan KK Miskin di Kota Bogor

Mempertimbangkan keadaan diatas dan komitmen Pemerintah Kota Bogor pada kesepakatan bupati walikota yaitu akan menurunkan jumlah penduduk miskin agar bisa mencapai target MDGs, maka Pemerintan Kota Bogor menetapkan target mengentaskan kemiskinan setiap tahunnya sebesar 3 persen, dari jumlah keluarga miskin yang ada di Kota Bogor. Artinya Pemerintah Kota Bogor harus mengentaskan sebanyak minimal 1000 rumah tangga setiap tahunnya.

Pada dasarnya penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor mendapat perhatian besar, karena pada hakekatnya pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bogor bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Perhatian Pemerintah Kota Bogor semakin besar setelah adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, yaitu dengan dibentuknya beberapa program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penenggulangan kemiskinan secara tegas dinasukkan dalam salah satu Program Prioritas Pemerintah Kota Bogor sebagaimana termuat di dalam Perda Bo 1 tahun 2005 tentang Renstra.

Berbagai upaya Pemerintah Kota Bogor berupa program pemberdayaan masyarakat telah dan akan terus dilaksanakan untuk mencapai target yang diharapkan. Namun semakin banyak KK yang ingin diberdayakan atau dientaskan dari kemiskinan, maka akan semakin tinggi biaya yang dibutuhkan untuk hal tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bogor harus lebih jeli memilih program pemberdayaan, yaitu diantaranya memilih program yang memberikan *unit cost* rendah atau dengan biaya

tertentu dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk mengetahui program mana yang sesuai dengan sumberdaya dan pencapaian tujuan, maka perlu dilakukan analisa *cost effectiveness* dari berbagai program pemberdayaan masyarakat yang sudah berjalan.

Analisa *cost effectiveness* adalah suatu bentuk analisa ekonomi yang menghitung dan membandingkan biaya (*cost*) dan dampak (*outcome*) dari berbagai alternatif program yang dilakukan. Dalam situasi yang terbatas, analisa *cost effectiveness* sangat perlu dilakukan untuk memperbandingkan dan mencari program alternatif yang dianggap paling *cost effectiveness*. Suatu program dianggap lebih baik dan lebih *cost effectiveness* apabila program tersebut dapat menghasilkan *outcome* yang sama dengan biaya yang lebih rendah atau dengan biaya yang sama menghasilkan *outcome* yang lebih tinggi. Oleh karena itu, analisis *cost effectiveness* yang dilakukan akan meliputi analisis biaya dan analisis efektifitas program.

1.2. Tujuan

1.2.1. Tujuan Umum:

Menganalisis *cost effectiveness* dari berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan, untuk membantu membuat keputusan perencanaan program pemberdayaan selanjutnya di Kota Bogor.

1.2.2. Tujuan khusus:

1. Identifikasi program terkait pemberdayaan masyarakat di Kota Bogor
2. Menghitung unit cost dari berbagai program pemberdayaan masyarakat
3. Menganalisis potensi kehilangan PDRB yang dapat di cegah
4. Menganalisis *cost effectiveness*
5. Mengkategorikan berbagai program pemberdayaan masyarakat pada 2 kategori *cost effectiveness* (tidak *cost effectiveness* dan *cost effectiveness*)

1.3. Keluaran

1. Teridentifikasinya program pemberdayaan masyarakat dengan berbagai biaya dan keluaran

2. Terindentifikasinya berbagai program pemberdayaan masyarakat menurut kategori *cost effectiveness*
3. Tersedianya data berbagai program pemberdayaan masyarakat menurut kategori *cost effectiveness*, yang dapat digunakan untuk perencanaan program pemberdayaan selanjutnya.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Desain, Tempat dan Waktu

Desain penelitian yang digunakan adalah dengan metode survei. Lokasi penelitian adalah semua kecamatan yang ada di Kota Bogor yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor Tengah, Bogor Utara, dan Tanah Sareal. Dari masing-masing kecamatan diambil secara random 2 kelurahan yaitu Kelurahan Lawang Gintung dan Bojong Kerta dari kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Pasirmulya dan Cilendek Barat dari Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Katulampa dan Baranangsiang dari Kecamatan Bogor Timur, Kelurahan Ciwaringin dan Baranangsiang dari Kecamatan Bogor Timur, Kelurahan Ciwaringin dan Sempur dari Kecamatan Bogor Tengah, Kelurahan Tanah baru dan Kedunghalang dari Kecamatan Bogor Utara, serta Kelurahan Kedung waringin dan Kedung Jaya dari Kecamatan Tanah Sareal. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April sampai dengan Nopember 2008.

2.2. Teknik Penarikan Contoh

Penarikan contoh dilakukan secara *random*. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh rumahtangga penerima manfaat program di Kota Bogor baik dari program Dakabalarea, Garda Emas, P2KP maupun KUBE. Contoh diambil sebanyak 298 rumahtangga, yaitu 63 rumahtangga penerima program Dakabalarea, 84 rumahtangga penerima program Garda Emas, 76 rumahtangga penerima program P2KP, dan 75 rumahtangga penerima program KUBE. Responden adalah kepala rumahtangga atau istri yang bersatus sebagai penerima program.

2.3. Jenis dan Cara Pengambilan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder (Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Jenis dan cara pengambilan data

No.	Jenis Data	Cara Pengambilan
1.	Identitas responden (jenis kelamin, usia, status dalam keluarga, dan pendidikan),	Wawancara dengan menggunakan kuisioner (Jenis pertanyaan yang digunakan berupa pertanyaan terbuka dan tertutup)
2.	Keragaan program yang diterima responden (besarnya dana bergulir, biaya operasional, jumlah penerima program dan tingkat pengembalian)	Wawancara dengan menggunakan kuisioner
3.	Keragaan usaha responden (pelatihan, pendampingan, modal, bunga, lama cicilan, dan status pelunasan, jenis usaha, keberjalanan usaha dan pengembangan usaha, omset dan keuntungan serta alasan usaha berkembang dan tidak berkembang/bangkrut)	Wawancara dengan menggunakan kuisioner
4.	Data sekunder: Keragaan program (modal yang digulirkan, populasi penerima program, tingkat pengembalian, persentase sasaran yang berhasil usahanya dan atau melakukan pengembangan jenis usaha, dan indikator keberhasilan program)	Pustaka dari berbagai laporan program pemberdayaan ekonomi masyarakat (program Dakabalaera, Garda Emas, P2KP dan KUBE).

Data primer terdiri dari data karakteristik responden atau penerima program (jenis kelamin, status dalam keluarga dan pendidikan), keragaan usaha penerima program (input: jenis usaha, besarnya modal yang diterima, ada tidaknya pelatihan sebelum memulai usaha, proses: ada tidaknya pendampingan, bunga, lama cicilan, tingkat pengembalian cicilan, dan output: pendapatan, omset, keuntungan, tabungan dan pengembangan usaha), keragaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dari program Dakabalaera, Garda Emas, P2KP dan KUBE (Besarnya modal yang digulirkan, biaya operasional, jumlah penerima program dan tingkat pengembalian). Pengambilan data

primer dilakukan dengan teknik wawancara menggunakan kuisioner (Lampiran 1).

2.4. Pengolahan dan Analisis Data

2.4.1. Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan *Microsoft Excel 2003, dan SPSS for Window versi 13.0*.

Pengolahan data keragaan program (Besarnya modal yang digulirkan, biaya operasional, jumlah penerima program dan tingkat pengembalian), karakteristik penerima program (jenis kelamin, status dalam keluarga dan pendidikan) dan keragaan usaha penerima program (input: jenis usaha, besarnya modal yang diterima, ada tidaknya pelatihan sebelum memulai usaha, proses: ada tidaknya pendampingan, bunga, lama cicilan, tingkat pengembalian cicilan, dan output: pendapatan, omset, keuntungan, tabungan dan pengembangan usaha) dilakukan dengan analisis secara deskriptif. Besarnya peningkatan pendapatan, omset sebelum maupun sesudah menerima program dihitung dalam satuan rupiah perbulan. Besarnya keuntungan setelah menerima program dihitung antara selisih omset sebelum menerima program dan omset setelah menerima program. Besarnya penggunaan dana dalam program merupakan penjumlahan besarnya dana yang digulirkan, dikurangi dana yang sudah dikembalikan dan ditambah dengan biaya operasional.

Menghitung peluang keberhasilan program melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Peluang keberhasilan program} = \frac{\text{Jumlah target yang berhasil}}{\text{Jumlah target yang berhak mendapat intervensi}}$$

Peluang keberhasilan juga dihitung berdasarkan rasio dari jumlah penerima program yang masih berjalan usahanya sampai saat dilakukan penelitian dengan jumlah keseluruhan contoh yang diambil untuk masing-masing program.

Unit cost dari tiap-tiap program dihitung berdasarkan total dana yang dikeluarkan dikurangi yang sudah dikembalikan dibagi jumlah populasi penerima program.

Analisis secara inferensia menggunakan uji korelasi *pearson* untuk menganalisis hubungan antara besarnya dana bergulir atau modal usaha yang diberikan dan omset yang diterima dengan besarnya keuntungan.

2.4.2. Analisis Cost effectiveness Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Cost effectiveness (CE) program ekonomi didefinisikan sebagai rasio antara biaya total yang digunakan oleh setiap program terhadap potensi kehilangan Produk Domestik Bruto (PDB). Secara matematis formula CE dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CE = \frac{\text{Biaya Total}}{\text{Potensi kehilangan PDB}}$$

Nilai CE dapat diinterpretasikan sebagai besaran biaya yang dapat menyelamatkan Rp 1 PDB. Sedangkan nilai $1/CE$ dapat diinterpretasikan sebagai PDB yang dapat diselamatkan oleh setiap Rp 1 biaya yang dialokasikan atau yang digunakan.

Perhitungan PDB yang dapat diselamatkan oleh program dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$PDB_i = \sum_{j=1}^{b_i} \frac{K_i}{(1 + r_i)^j} p_i N_i$$

Keterangan:

PDB_i = Produk Domestik Bruto yang dapat diselamatkan oleh program ke- i

- $i=1 \geq$ Dakabalaera
- $=2 \geq$ Garda Emas
- $=3 \geq$ P2KP
- $=3 \geq$ Kube

b_i = lama menjalankan program ke- i dalam bulan sejak menerima program sampai umur produktif usia 65 tahun. Saat

menerima, usia semua penerima di dekati dengan usia rata-rata penerima program ke-i.

K_i = Kentungan pendapatan tambahan sebagai akibat menerima atau menjalankan program ke-i bagi yang usahanya masih berjalan sampai saat diwawancara.

r_i = bunga bank per bulan program ke-i, saat ini tahun 2008 besarnya sekitar 0.5

% = 0.05. Artinya kalau tambahan hasil usaha tersebut disimpan di Bank maka perbulannya akan mendapat bunga sebesar 5 % bagi setiap program

p_i = Peluang seseorang akan tetap dapat menjalankan usahanya apabila menerima program ke-i. Nilai ini didekati dengan cara merasikan jumlah penerima program ke-i yang menurut penerima masih berjalan dan menurut petugas juga masih berjalan dibagi ukuran sampel (penerima program ke-i yang diwawancara)

N_i = Banyaknya penerima program ke-i

Selanjutnya nilai CE_i dapat dihitung sebagai berikut:

$$CE_i = \frac{D_i}{PDB_i} \quad \text{atau} \quad 1/CE_i = \frac{PDB_i}{D_i}$$

Keterangan:

CE_i = Cost-Effectiveness program ke-i

D_i = Total dana yang digunakan untuk program ke-i, yaitu terdiri dana yang dikucurkan dan digunakan ditambah biaya operasional.

PDB_i = Produk Domestik Bruto yang dapat dicegah atau diselamatkan sampai umur penerima berusia 65 tahun karena menerima atau mendapat program ke-i

2.5. Keterbatasan data

1. Karena keterbatasan data penerima program di beberapa kelurahan terpilih, maka tidak semua penerima program yang ijadikan sample diambil secara random, tetapi mereka diambil secara purposive berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan.

2. Evaluasi yang dilakukan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat (Dakabalaera, Garda Emas, P2KP dan KUBE) hanya meliputi input, proses dan *output*, tidak sampai melakukan evaluasi *outcome*.
3. Evaluasi atau analisis cost effectiveness pada Program Dakabalaera hanya dilakukan pada program Daka PIM dan Daka UMUM tidak mengikutsertakan program Daka PKK.

2.6. Metode Penyusunan

Penyusunan dilakukan dalam 4 tahapan berikut:

1. Kegiatan diawali dengan dilakukannya pertemuan atau diskusi dari berbagai instansi yang terkait program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Diskusi bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan tentang program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang akan dianalisis, serta variabel yang akan diteliti.
2. Pengumpulan data primer maupun sekunder yang dilakukan oleh masing-masing instansi terkait program perberdayaan ekonomi masing-masing yang diteliti.
3. Analisis data, baik data primer maupun data sekunder berdasarkan rumus yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang dilaksanakan.
4. Penyusunan laporan

BAB III

KEADAAN UMUM KOTA BOGOR

Kota Bogor adalah salah satu kota yang berada dibawah wilayah administratif Propinsi Jawa Barat dan hanya berjarak lebih kurang 50 Km dari pusat pemerintahan Indonesia, Jakarta. Kota dengan luas 11.850 ha ini dihuni lebih dari 820.707 jiwa yang tersebar di enam kecamatan, 68 kelurahan. Visi Kota Bogor adalah: "Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah" Adapun misi Kota Bogor adalah:

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada
2. Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan berketerampilan
4. Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum

3.1. Kondisi Geografis Kota Bogor

Luas wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 Ha atau 0,27% dari luas propinsi Jawa Barat. Secara Administratif kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan dan 37 desa (lima diantaranya termasuk desa tertinggal yaitu desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT dan dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor

Bagian selatan yaitu Kecamatan Kota Bogor Selatan berpotensi sebagai daerah permukiman dengan KDB rendah dan ruang terbuka hijau. Bagian Utara yaitu Kecamatan Bogor Utara berpotensi sebagai daerah industri non-polutan dan sebagai Penunjangnya adalah permukiman serta perdagangan dan jasa dan Kecamatan Tanah Sareal cenderung berpotensi sebagai permukiman, perdagangan dan jasa, serta fasilitas pelayanan kota. Bagian Barat yaitu Kecamatan Bogor Barat berpotensi sebagai daerah permukiman yang ditunjang oleh objek wisata. Bagian Timur yaitu Kecamatan Bogor Timur berpotensi sebagai daerah permukiman. Bagian Tengah yaitu Kecamatan Bogor Tengah berpotensi sebagai pusat perdagangan dan jasa yang ditunjang oleh perkantoran dan wisata ilmiah.

Ciri-ciri daerah perkotaan adalah kepadatan penduduk per kilometer persegi sangat tinggi diatas 5.000 jiwa/km², untuk Kota Bogor rata-rata per kilometer ditempati sebanyak 6.662 jiwa penduduk. Kepadatan tertinggi ada di kecamatan Bogor Tengah yaitu sebesar 11.770 jiwa/km² dan terendah ada di kecamatan Bogor Selatan 5.019 jiwa/km².

Jumlah penduduk Kota Bogor tahun 2006 mencapai 750.250 orang yang terdiri dari 379.446 orang laki-laki dan 370.804 orang perempuan. Jumlah penduduk Kota Bogor berdasar Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jumlah penduduk Kota Bogor berdasar Kecamatan tahun 2006

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Bogor Selatan	77.254	73.881	151.135
Bogor Timur	38.307	38.958	77.265
Bogor Utara	64.148	61.710	125.858
Bogor Barat	86.496	84.148	170.644
Bogor Tengah	46.235	46.620	92.855
Tanah Sareal	67.006	65.487	132.493
Jumlah	379.446	370.804	750.250

Kota Bogor terletak diantara 106°480'BT dan 6°360'LS serta mempunyai ketinggian rata rata minimal 190 meter, maksimal 350 meter, kemiringan lereng antara 0-3%, 4-15%, 16-

30% dan diatas 40% dengan jarak dari ibukota kurang lebih 60 km, dikelilingi Gunung Salak, Gunung Pangrango dan Gunung Gede. Lokasi Kota Bogor sangat dekat dengan ibukota negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata.

Kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26°C dengan suhu terendah 21.8°C dengan suhu tertinggi 30.4°C . Kelembaban udara 70%, Curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500-4000 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Desember dan Januari.

Kota Bogor berpenduduk 820.707 jiwa dengan komposisi 419.252 laki-laki dan perempuan 401.455 jiwa, dikenal dengan sebutan Kota Hujan karena memiliki curah hujan yang tinggi yaitu berkisar 3.500 – 4.000 mm/tahun.

Secara umum Kota Bogor ditutupi oleh batuan vulkanik yang berasal dari endapan (batuan sedimen) dua gunung berapi, yaitu Gunung Pangrango (berupa satuan breksi tupaan/kpbb) dan Gunung Salak (berupa aluvium/kal dan kipas aluvium/kpal). Lapisan batuan ini berada agak dalam dari permukaan tanah dan jauh dari daerah aliran sungai. Endapan permukaan umumnya berupa aluvial yang tersusun oleh tanah, pasir dan kerikil hasil dari pelapukan endapan yang baik untuk vegetasi. Dari struktur geologi tersebut, maka Kota Bogor memiliki daya dukung tanah yang berada antara $1,5 \text{ kg/cm}^2$.

Sebagai salah satu bagian dari Propinsi Jawa Barat, Kota Bogor merupakan penyangga ibukota negara yang memiliki aset wisata ilmiah yang bersifat internasional (Kebun Raya atau Botanical Garden). Pusat Kota Bogor terletak 100 km disebelah Selatan dari Pelabuhan Sunda Kelapa yang pada jaman dahulu kala merupakan pelabuhan terpenting bagi Negara Pakuan Pajajaran yang pusatnya sekitar Batu Tulis di Selatan Kota Bogor.

Kota Bogor dengan ketinggian dari permukaan laut minimal 190 m dan maksimal 330 m, memiliki udara rata-rata setiap bulannya adalah 26°C dan suhu udara terendah 21.8°C , dengan kelembaban udara kurang lebih 70%. Sedangkan curah hujan cukup besar setiap tahunnya yaitu berkisar antara 3500-4000 mm dengan luas 4.992,30 ha, antara 4000-4500 mm dengan luas

6.424,65 ha, dan antara 4500-5000 mm dengan luas 433,05 ha, terutama pada bulan Desember sampai dengan bulan Januari.

Kota Bogor yang disebut sebagai Kota Hujan dialiri beberapa sungai yang permukaan airnya jauh dibawah permukaan Kota, yaitu Sungai Ciliwung, Cisadane, Cipakancilan, Cidepit, Ciparigi, dan Cibalok, maka boleh dikatakan secara umum Kota Bogor aman dari bahaya banjir.

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Tahun 1999-2009), fungsi Kota Bogor adalah :

1. Sebagai Kota Perdagangan
2. Sebagai Kota Industri
3. Sebagai Kota Permukiman
4. Wisata Ilmiah
5. Kota Pendidikan

Dalam konteks Regional Kota Bogor adalah:

1. Kabupaten Bogor, bahwa Kota Bogor sebagai pusat pengembangan di Wilayah VII yang melayani area Kota Bogor dan area sekitar Kota Bogor
2. Jabodetabek, bahwa Kota Bogor merupakan kota yang diarahkan untuk menampung 1,5 juta jiwa pada tahun 2009
3. Negara, Kota Bogor merupakan kota yang menampung kegiatan yang jenuh di ibu kota

Dalam Konteks Internasional Kota Bogor merupakan pusat kegiatan-kegiatan Internasional konferensi-konferensi antara lain seperti Jakarta Informal Meeting untuk APEC yang dihadiri oleh para pemimpin negara dari Asia Pacific termasuk Amerika Serikat. Dengan demikian Kota Bogor harus menyiapkan dirinya menjadi kota jasa yang siap melayani kebutuhan-kebutuhan ,event-event nasional/internasional yang akan dan bisa diselenggarakan di Kota Bogor.

3.1.1. Topografi

Kota Bogor merupakan daerah perbukitan bergelombang dengan ketinggian yang bervariasi antara 190 s/d 350 m diatas permukaan laut dengan kemiringan lereng berkisar 0-2% (datar) seluas 1.763,94 ha, 2-15% (landai) seluas 8.091,27 ha, 15-25% (agak curam) seluas 1.109,89 ha, 25-40% (curam) seluas

764,96 ha, dan > 40% (sangat curam) seluas 119,94 ha. Berikut disajikan Tabel 2.1 kemiringan lereng berdasarkan luas lahan di Kota Bogor sebagai berikut :

Tabel 3.2 Kemiringan Lereng Berdasarkan Luas Lahan

Kecamatan	Kemiringan Lereng (ha)					Jml
	0 - 2 %	2 - 15 %	15 - 25	25 - 40 %	> 40 %	
	Datar	Landai	Agak Curam	Curam	Sangat curam	
Bogor utara	137,85	1.565,65	-	68,00	0,50	1.772
Bogor timur	182,30	722,70	56,00	44,00	10,00	1.015
Bogor selatan	169,10	1.418,40	1.053,89	350,37	89,24	3.081
Bogor tengah	125,44	560,47	-	117,54	9,55	813
Bogor barat	618,40	2.502,14	-	153,81	10,65	3.285
Tanah sareal	530,85	1.321,91	-	31,24	-	1.884
Jumlah	1.763,94	8.091,27	1.109,89	764,96	119,94	11.850

Sumber : Data Pokok Pembangunan Kota Bogor Tahun 2003

3.1.2. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan identik dengan struktur penggunaan lahan dimana wilayah Kota Bogor memiliki luas 11.850 ha. Dari luas wilayah tersebut terdistribusi kedalam lahan permukiman seluas 8.296,63 ha atau 70,01% dan pada umumnya wilayah permukiman ini berkembang secara linier mengikuti jaringan jalan yang ada, sehingga berpotensi dalam menambah laju tingkat perkembangan wilayah Kota Bogor. Penggunaan lahan untuk pertanian baik sawah maupun ladang seluas 1.288,66 ha atau 10,87% dan penggunaan kebun campuran mencapai 154,55 ha atau 1,30%. Sedangkan penggunaan lahan untuk hutan kota seluas 141,50 ha atau 1,19%, dan sisanya untuk kegiatan lainnya seperti fasilitas sosial, perdagangan dan jasa, perkantoran, kuburan, taman dan lapangan olah raga lokasi menyebar di Wilayah Kota Bogor (Tabel 3.3).

Tabel 3.3. Persentase Luasan Penggunaan Lahan

Jenis Penggunaan	Luas (Ha) Tahun 2003	Percentase (%)
Permukiman	8.300,00	70,042
TPA Sampah	-	-
Kolam Oxidasi	1,50	0,013
Pertanian	854,67	7,212
Kebun Campuran	85,00	0,717
Industri	115,03	0,971
Perdagangan dan jasa	726,80	6,133
Perkantoran /pemerintahan	98,00	0,827
Hutan Kota	141,50	1,194
Taman /Lapangan	250,48	2,114
Olah Raga	299,28	2,526
Kuburan	337,07	2,845
Sungai/Situ/Danau	629,37	5,311
Jalan	2,70	0,023
Jumlah	11.850,00	100,00

Sumber: Dinas Permukiman Tahun 2003

3.2. Sarana Transportasi Jalan

Prasarana transportasi darat berupa jalan di Kota Bogor berupa jalan meliputi jalan negara, jalan propinsi, jalan kota, dan jalan lingkungan sebagai berikut:

1. Jalan negara dengan ruas jalan sepanjang 30,199 km dari panjang jalan tersebut kondisinya pada tahun 2003 adalah baik 17,633 km, sedang 10,150 km, dan rusak 2,416 km
2. Jalan propinsi dengan ruas jalan sepanjang 26,759 km, dengan kondisi baik 10,596 km, sedang 8,388 km dan rusak 7,775 km
3. Jalan kota dengan ruas jalan sepanjang 564,193 km, dengan kondisi baik 129,573 km, sedang 284,648 km, rusak 76,094 km dan rusak berat 73,878 km
4. Jalan lingkungan dengan ruas jalan sepanjang 212,704 km yang tersebar di berbagai lingkungan permukiman

3.3. Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh adalah kawasan yang mempunyai ciri – ciri antara lain kondisi prasarana dan sarana dasar yang kurang memadai, kondisi bangunan dan lokasi yang kurang layak serta kondisi sosial ekonomi penghuni yang rendah. Umumnya kawasan berada pada lokasi yang memiliki karakter di sepanjang bantaran sungai, tepian rel kereta api, sekitar area pusat perdagangan, sekitar area transisi (pinggiran kota), sekitar area rawan banjir dan longsor serta area kantong-kantong permukiman diantara rumah-rumah mewah (terjepit).

Kawasan kumuh pada Tahun 2003 seluas ± 33,75 ha atau sebesar 81,38% dari luas kawasan kumuh perkotaan sebesar 41,47 ha dengan penanganan aspek fisik, meliputi perbaikan prasarana dasar permukiman, seperti perbaikan/pembuatan jalan dan jembatan lingkungan, jalan dan jembatan setapak, MCK (mandi, cuci, kakus), gorong-gorong, saluran penggelontoran, saluran jalan lingkungan, dan pembuatan talud serta pemugaran rumah tidak layak huni yang meliputi plesterisasi lantai rumah, pembuatan jendela, pembuatan lubang asap dapur, pembuatan sumur gali dan kakus.

Bina manusia dan bina usaha merupakan penanganan aspek sumber daya manusia dan ekonomi yang dilakukan antara lain melalui pelibatan warga masyarakat setempat dalam kegiatan bina lingkungan sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan mereka. Selain itu dilakukan langkah-langkah penyuluhan, pembinaan, serta penyaluran bantuan modal usaha yang mengarah pada upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya penanganan tersebut kawasan kumuh yang harus mendapat perhatian pada Tahun Anggaran 2004 tersisa seluas 7,72 ha.

Secara umum kondisi tingkat kekumuhan di Kota Bogor saat ini sebagai berikut:

1. Tingkat kekumuhan kondisi prasarana dan sarana dasar, yaitu:
 - a. Sangat kumuh seluas 5,7 ha sebanyak 3 lokasi
 - b. Kumuh seluas 10,58 ha sebanyak 6 lokasi
 - c. Kumuh sedang seluas 156,18 ha sebanyak 34 lokasi
 - d. Kumuh ringan seluas 52,85 ha sebanyak 26 lokasi

2. Tingkat kekumuhan kondisi bangunan, yaitu:
 - a. Kumuh seluas 3,81 ha sebanyak 4 lokasi
 - b. Kumuh sedang seluas 64,15 ha sebanyak 16 lokasi
 - c. Kumuh ringan seluas 86,69 ha sebanyak 38 lokasi
3. Tingkat kekumuhan kondisi lokasi, yaitu:
 - a. Kumuh sedang seluas 34,89 ha sebanyak 19 lokasi
 - b. Kumuh ringan seluas 148,70 ha sebanyak 39 lokasi
4. Tingkat kekumuhan kondisi kependudukan, yaitu:
 - a. Kumuh seluas 0,86 ha sebanyak 2 lokasi
 - b. Kumuh sedang seluas 9,94 ha sebanyak 12 lokasi
 - c. Kumuh ringan seluas 199,02 ha sebanyak 50 lokasi
5. Tingkat kekumuhan kondisi sosial ekonomi, yaitu:
 - a. Sangat kumuh seluas 43,12 ha sebanyak 17 lokasi
 - b. Kumuh seluas 48,53 ha sebanyak 21 lokasi
 - c. Kumuh sedang seluas 116,98 Ha sebanyak 22 lokasi
 - d. Kumuh ringan seluas 11,39 ha sebanyak 7 lokasi

3.4. Kondisi Perekonomian

Perkembangan perekonomian Kota Bogor tahun 2002 menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,78 % meningkat menjadi 6,07 % tahun 2003. Pertumbuhan yang cukup baik ini merupakan modal yang baik untuk pemulihan ekonomi Kota Bogor.

Indikator makro perekonomian diukur dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB Kota Bogor. Untuk tahun 2001 harga konstan sebesar Rp. 1.209.642,71 harga berlaku Rp. 2.954.164,95. Tahun 2002 harga konstan sebesar Rp. 1.279.881,96 harga berlaku sebesar Rp. 3.282.218,41, meningkat 6,07% menjadi sebesar Rp. 1.357.633,57 tahun 2003 berdasarkan harga konstan, sedangkan harga berlaku sebesar Rp. 3.645.650,79 meningkat 11,07%.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor tahun 2003 sebesar 6,07 % mengalami peningkatan 0,29 % dari tahun 2002 yaitu sebesar 5,78 %. Peningkatan LPE tersebut, diperoleh dari kontribusi sembilan sektor lapangan usaha. Sedangkan laju inflasi tahun 2003 sebesar 2,80 % lebih rendah 0,10 % dibandingkan laju inflasi tahun 2002. Menurunnya laju inflasi tersebut

disebabkan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkorelasi atau berhubungan terhadap laju inflasi pada kelompok pengeluaran seperti bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan umum. Demikian pula kenaikan tersebut menunjukkan bahwa jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dan dikonsumsi masyarakat semakin meningkat, sehingga kenaikan PDRB identik dengan pertumbuhan ekonomi yang secara positif dapat mengerakkan sektor riil di Kota Bogor.

Meningkatnya PDRB tersebut berimplikasi terhadap meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat Kota Bogor dari tahun 2002-2003, yaitu berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 4.227.462,01 menjadi sebesar Rp. 4.605.734,59 atau meningkat 8,94 %, sedangkan berdasarkan harga konstan Rp. 1.648.474,19 menjadi Rp. 1.715.166,99 atau meningkat 4,04 %.

Sektor Lapangan Usaha yang memberikan kontribusi bagi peningkatan PDRB Kota Bogor adalah sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 12,35 %, pertanian sebesar 0,40 % pengangkutan dan komunikasi 10,62 %, industri pengolahan 26,44%, listrik, gas dan air Bersih 3,06% perdagangan, hotel dan restoran 31,27%, jasa-jasa 7,37 dan sektor bangunan sebesar 8,50%.

3.5 Industri

Aktivitas Bidang Industri di Kota Bogor pada tahun 2003 melibatkan 2.722 unit usaha, ini berarti ada peningkatan 2,91 % dari tahun 2002 yang berjumlah 2.645 unit usaha. Dengan menyerap 43.612 tenaga kerja ini berarti ada kenaikan 1,11 % dari tahun 2002 yang berjumlah 43.131 dan dengan investasi sebesar Rp. 357.216.795.046,00 ini berarti ada kenaikan sebesar 3,19 % dari tahun 2002 sebesar Rp. 346.152.695.053,00 terdiri dari 56 unit industri menengah/besar yang menyerap 23.870 tenaga kerja dengan investasi sebesar Rp. 328.014.725.889,00 dan 728 unit industri kecil formal yang menyerap tenaga kerja 11.192 dengan investasi bernilai Rp. 26.326.518.987,00 serta 1.938 unit industri kecil non formal yang menyerap tenaga kerja 8.550 dengan investasi sebesar Rp. 2.875.550.164,00

Sasaran pembentahan Bidang Industri adalah berkembangnya Industri Kecil, Industri Rumah Tangga dan Industri Menengah serta meningkatnya daya saing industri melalui perbaikan mutu dan disain yang berkeunggulan kompetitif.

3.6. Pertanian

Bidang Pertanian Kota Bogor memiliki potensi lahan Pertanian 3.466,43 ha terdiri dari 1.006 ha lahan sawah, 1.479,67 ha lahan kering, 869,29 ha lahan pekarangan, dan 111,470 ha berupa situ dan kolam. Potensi lainnya adalah sumber daya manusia terdiri dari petani, pelaku agribisnis dan aparatur. Sebagian besar petani bergabung dalam 188 kelompok tani. Terdiri dari 159 kelompok tani berusaha di sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, 25 kelompok tani berusaha di sub sektor peternakan dan 4 kelompok tani berusaha di sub sektor perikanan, baik ikan konsumsi maupun ikan hias.

Dalam Ketersediaan Pangan, khususnya aspek produksi (*on farm*), melalui SK Walikota Bogor Nomor: 520.45-142 Tahun 2003 Tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian di Wilayah Kota Bogor Tahun 2003, telah ditetapkan sasaran area tanaman pangan, tanaman hortikultura, intensifikasi peternakan serta intensifikasi perikanan intensifikasi tanaman pangan meliputi sub kegiatan PAT (Perluasan Area Tanam) melalui peningkatan IP (Indeks Pertanaman), dan PMI (Peningkatan Mutu Intensifikasi) serta Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) pada tanaman padi, palawija dan hortikultura. Keragaan capaian kegiatan PAT pada akhir bulan Desember 2003, untuk komoditas padi, palawija dan hortikultura adalah seperti tertera pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Tanam Padi, Palawija dan Hortikultura Tahun 2003

Komoditi	Target (ha)	Realisasi (ha)	Persentase (%)
Padi	1.500	1.165	77,67
Jumlah padi	1.500	1.165	77,67
Jagung	350	382	109,14
Kedelai	7	5	71,43

Ubi kayu	310	350	112,90
Ubi jalar	100	130	130,00
Kacang tanah	110	62	56,36
Talas	215	275	127,90
Kacang hijau	5	4	80,00
Jumlah Palawija	1.097	1.208	110,12
Tomat	60	47	78,33
Kacang panjang	20	29	145,00
Mentimun	37	63	170,27
Cabai	60	68	113,33
Bayam	25	47	188,00
Daun bawang	85	152	178,82
Petsai	11	15	136,36
Buncis	45	66	146,67
Kangkung	30	54	180,00
Terung	30	56	186,67
Katuk	50	75	150,00
Caysin	90	100	111,11
Jumlah sayuran	543	772	141,62

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi tanam padi tercapai seluas 1.165 ha atau 77,67% terhadap target 1.500 ha. Realisasi tanam palawija (meliputi jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, talas, serta kacang hijau) realisasi seluas 1.208 ha atau 110,12% dari target 1.907 ha. Komoditas sayuran (meliputi tomat, terung, kacang panjang, mentimun, cabai, bayam, bawang daun, petsai, buncis, kangkung, katuk, serta caysin) seluas 772 ha atau 141,62% dari target 543 ha.

Tidak tercapainya realisasi tanam padi selama 1 tahun seluas 335 ha diakibatkan terjadinya alih komoditi dari padi ke palawija seluas 111 ha dan sayuran seluas 232 ha terjadi pada periode Januari s/d Maret dan Oktober s/d Desember. Selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2003 telah terealisasi panen pada berbagai komoditas seperti tercantum pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 menggambarkan tentang persentase capaian panen terhadap target panen selama satu tahun (sampai dengan Desember 2003). Panen padi target adalah 1500 ha, realisasi panen sebanyak 1.165 ha. Tingkat capaian panen padi dari target yang sudah ditentukan adalah 77,67 % atau lebih kecil dari panen yang ditargetkan. Total produksi padi dari capaian tersebut adalah 9953,28 ton.

Untuk palawija dan sayuran tingkat capaianya lebih dari 100% yaitu masing-masing 110,12% dan 141,62%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk palawija dan sayuran realisasi tanam yaitu masing-masing 1208 ha dan 772 ha lebih besar dari target tanam yaitu masing-masing 1097 ha dan 543 ha.

Total produksi palawija adalah sebesar 12.317,5 ton dan total produksi sayuran sebesar 8.295,78 ton. Produksi jenis palawija yang paling tinggi adalah jagung sebesar 6.720 ton menyusul ubi kayu sebesar 3.040 ton, ubi jalar 1.420 ton dan talas 980,2 ton.

Jenis sayuran yang produksinya paling tinggi adalah bayam 1.390 ton, katuk 1.125 ton, mentimun 1.090,04 ton dan caysin 1.000 ton, tomat 660 ton, petsai 650 ton, kangkung 550 ton, kacang panjang 504 ton, dan cabai 486,02 ton.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Panen Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura (Sayuran) Tahun 2003.

Komoditi	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Persentase (%)
Padi	1.500	1.165	77,67
Jumlah Padi	1.500	1.165	77,67
Jagung	350	382	109,14
Kedelai	7	5	71,43
Ubi Kayu	310	350	112,90
Ubi Jalar	100	130	130,00
Kacang Tanah	110	62	56,36
Talas	215	275	127,90
Kacang Hijau	5	4	80,00
Jumlah Palawija	1.097	1.208	110,12

Komoditi	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Percentase (%)
Tomat	60	47	78,33
Terung	20	29	145,00
Kacang Panjang	37	63	170,27
Mentimun	60	68	113,33
Cabai	25	47	188,00
Bayam	85	152	178,82
Bawang Daun	11	15	136,36
Petsai	45	66	146,67
Buncis	30	54	180,00
Kangkung	30	56	186,67
Katuk	50	75	150,00
Caysin	90	100	111,11
Jumlah Sayuran	543	772	141,62

3.5.1. Peternakan

Intensifikasi peternakan secara nasional, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak melalui peningkatan pendapatan dengan peningkatan kualitas dan produktivitas sumberdaya masyarakat peternak. Secara garis besar peternakan di Kota Bogor meliputi golongan hewan besar, hewan kecil dan unggas dengan populasinya, namun disini akan dibahas mengenai peternakan sapi perah.

Berdasarkan SK Walikota Bogor Nomor 520.45-142 - Tahun 2003, Tanggal 11 Agustus 2003 sasaran intensifikasi sapi perah adalah populasi awal 2003 sebanyak 709 ekor dan target populasi akhir adalah 709 ekor dengan sasaran produksi susu 1.816.458 liter. Sampai dengan bulan Desember 2003 populasi sapi perah adalah sebanyak 1.020 ekor dengan produksi susu diperhitungkan 2.613.240 liter. Terjadinya penambahan populasi sapi perah sebanyak 311 ekor (43,86%) disebabkan adanya pemasukan sapi dara dan laktasi dari luar daerah (273 ekor=38,50%). Meskipun demikian angka kelahiran terjadi pula dalam jumlah kecil (38 ekor =5,36%). Pada akhir bulan Desember tahun 2003 populasi sapi potong adalah 131 ekor (108,26%). Pertambahan populasi terjadi karena adanya pemasukan sapi potong bakalan dari luar daerah (sebanyak 10 ekor).

3.5.2 Perikanan

Untuk Intensifikasi Perikanan potensi perikanan di Kota Bogor semakin nyata setelah terjadi perluasan wilayah, baik ikan konsumsi maupun ikan hias. Pengembangan usaha perikanan konsumsi di kolam lebih banyak diarahkan untuk penyediaan jenis ikan yang menghasilkan produk yang dapat diserap pasar lokal dan sekaligus untuk penyediaan kecukupan gizi masyarakat, sedangkan budidaya ikan hias diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional dan ekspor dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ikan konsumsi dibudidayakan di kolam air tenang, kolam air deras dan karamba. Potensi budidaya ikan konsumsi di kolam air tenang di tiap kecamatan berdasarkan Rumah Tangga Pembudidayaan Perikanan dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut :

Dari Tabel 3.6 terlihat bahwa di setiap Kecamatan terdapat RTP pemberian dan pembesaran meskipun dengan jumlah produksi yang berbeda. Produksi pemberian yang terbesar ada di Kecamatan Tanah Sareal sebesar 3.650.033 ekor menyusul di Kecamatan Bogor barat sebesar 3.377.533 ekor. Sedangkan produksi pembesaran yang paling tinggi yaitu juga di Kecamatan Tanah Sareal sebesar 677.027 ekor kemudian di Kecamatan Bogor Utara sebesar 361.092 ekor. Total Produksi pemberian dan pembesaran ikan di Kota Bogor masing-masing sebesar 7.373.998 ekor dan 1.543.692 ekor.

Tabel 3.6 Jumlah RTP Pembudidaya di Kolam Air Tenang Kota Bogor Tahun 2003

Kecamatan	RTP pemberian	Luas (ha)	RTP pembesaran	Luas (ha)	Produksi pemberian (ekor)	Produksi pembesaran (kg)
Bogor barat	62	33.775	188	53.745	3.377.533	268.727
Bogor timur	15	101	43	1.158	10.133	5.792
Bogor utara	3	1.700	193	72.218	170.033	361.092
Bogor tengah	1	100	29	3.335	10.033	16.677
Bogor selatan	10	1.562	142	42.875	156.233	214.377
Tanah sareal	38	36.500	284	135.405	3.650.033	677.027
Jumlah	129	73.738	879	308.736	7.373.998	1.543.692

Sedangkan potensi budidaya ikan konsumsi di kolam air deras di tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7 Jumlah RTP di Kolam Air Deras Kota Bogor Tahun 2003

Kecamatan	Jumlah RTP	Jumlah Fasilitas (Unit/Kantong)	Luas (m ²)	Produksi (Kg)
Bogor barat	-	-	-	-
Bogor timur	2	6	210	1.472
Bogor utara	3	3	206	1.444
Bogor tengah	7	7	16	114
Bogor selatan	-	-	-	-
Tanah sareal	1	3	70	492
Jumlah	13	19	502	3.522

Budidaya ikan konsumsi di air tenang selain di kolam dilakukan juga di sawah baik sebagai palawija maupun sebagai penyelang. Jumlah RTP pembudidaya ikan di sawah adalah seperti pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Jumlah RTP Pembudidaya Di Sawah Kota Bogor Tahun 2003

Kecamatan	RTP Pembesaran	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
Bogor barat	10	5,20	19,20
Bogor timur	-	-	-
Bogor utara	1	0,1	1,35
Bogor tengah	-	-	-
Bogor selatan	-	-	-
Tanah sareal	7	0,65	3,275
Jumlah	18	5,95	23,825

Dalam pemanfaatan sumberdaya air para pembudidaya ikan memanfaatkan beberapa bagian sungai/kali untuk memelihara ikan dalam karamba. Jumlah RTP di dalam karamba adalah seperti tercantum pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Jumlah RTP Pembudidayaan di Karamba Kota Bogor
Tahun 2003

Kecamatan	RTP pembenihan	Luas (ha)	RTP pembesaran	Luas (ha)	Produksi pembenihan (ekor)	Produksi pembesaran (kg)
Bogor barat	62	33.775	188	53.745	3.377.533	268.727
Bogor timur	15	101	43	1.158	10.133	5.792
Bogor utara	3	1.700	193	72.218	170.033	361.092
Bogor tengah	1	100	29	3.335	10.033	16.677
Bogor selatan	10	1.562	142	42.875	156.233	214.377
Tanah sareal	38	36.500	284	135.405	3.650.033	677.027
Jumlah	129	73.738	879	308.736	7.373.998	1.543.692

Dalam pemasaran ikan hias Kota Bogor telah menguasai beberapa tingkat pasar baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Negara tujuan ekspor ikan hias dari Kota Bogor adalah :

1. Negara Asia meliputi Singapura, Thailand, Malaysia, Taiwan, Jepang, China, India dan Srilanka;
2. Negara Amerika Serikat dan Kanada;
3. Negara Eropa meliputi Perancis, Inggris, Belanda, Jerman, Denmark, Swedia, Polandia dan Ukraina;
4. Negara lain meliputi Bahrain, Cyprus, Israel, Turki dan Australia;

Volume ekspor ikan hias dari Kota Bogor ke beberapa negara per tahun dapat mencapai 6.000.000 ekor. Nilai ekspor ikan hias dari Kota Bogor pada tahun 2003 mencapai sebesar Rp. 3,5 M setara dengan 6.800.000 ekor. Pada saat ini pengusahaan ikan hias ditangani oleh para pelaku agribisnis yang meliputi: eksportir sebanyak 3 perusahaan (CV. Indonesia Aquatic, CV Palace Farm dan Colysa Aquaria) supplier besar sebanyak 3 orang (Taufan Fish Farm, Wibowo Pribadi dan Koperasi Perikanan Kota Bogor) dan raiser sebanyak 156 orang.

Kota Bogor sebagai salah satu sentra produksi ikan hias telah mampu bermitra dengan para pelaku usaha ikan hias dari daerah lain yang berdekatan dengan Kota Bogor seperti Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi. Untuk menunjang pengembangan bisnis ikan hias, pada tahun 2003 di Kota Bogor

dibangun *holding ground* (terminal agribisnis ikan hias) di Kelurahan Rancamaya.

3.5.3 Konsumsi

Kebutuhan konsumsi bahan pangan masyarakat Kota Bogor dipenuhi oleh hasil kegiatan di *on farm* maupun *off farm*. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang menggambarkan kebutuhan konsumsi bahan pangan pokok (nabati dan hewani) pada bulan Januari sampai dengan Desember 2003 dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Kebutuhan dan Pemenuhan Konsumsi Bahan Pangan Masyarakat Kota Bogor Tahun 2003

Jenis Bahan Makanan (Komoditi)	Norma Gizi Nasional (Kg/Kap/Bln)	Total Kebutuhan Pangan Masyarakat (Ton)	Produksi Pangan Lokal (Ton)	Rasio PKM (%)	Suplai Pangan dari Luar Daerah (Ton)
Padi-padian :					
a. Beras	10,00	60.825,32	5.054,02	8,31	55.772,30
b. Jagung	1,9	11.557,00	977,83	8,46	10.579,17
Palawija/Umbi-umbian:					
a. Ubi Kayu, Ubi Jalar, Talas	6,23	37.894,79	738,90	1,95	3.7155,89
Kacang-kacangan :					
a. Kacang Tanah, Kacang Kedelai	1,39	8.454,85	30,63	0,36	8.424,22
Sayur-Sayuran :	5,48	33.332,8	3.596	10,79	29.736,8
Daging :					
a. Sapi, Babi, Domba, Ayam	0,84	5.109,41	3.091,98	60,52	2.017,43
Ikan	2,21	13.442,6	2.247,18	16,72	11.195,42
Telor	0,4	2.433,1	-	-	2.433,1
Susu	0,51	3.737,5	3.148,5	84,23	589

Dari Tabel 3.10 diatas terlihat bahwa kebutuhan bahan makanan masyarakat Kota Bogor khususnya padi-padian, palawija, sayur-sayuran, ikan dan telur cukup tinggi, adapun ketersediaan pangan lokal (produksi lokal) relatif kecil yaitu rata-rata dibawah 50% dari kebutuhan konsumsi 760.329 jiwa penduduk. Adapun kebutuhan daging dan susu dapat dipenuhi

lebih dari 60% oleh produksi lokal. Kekurangannya dipenuhi dengan mendatangkan dari luar daerah ataupun luar negeri (impor). Khusus untuk pemenuhan kebutuhan beras, Kota Bogor disuplai dari luar daerah seperti Indramayu, Karawang, Cianjur dan lainnya serta dari luar negeri seperti Cina, Vietnam, dan USA.

Untuk cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh Sub Dolog Wilayah II Cianjur yang memiliki gudang di Bogor setiap bulan menyalurkan beras sebanyak 4.000 ton. Sebagian dari persediaan beras Sub Dolog tersebut disalurkan sebagai "beras raskin" sebanyak 1.465 ton/bulan dan 300 ton/bulan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga TNI AU.

3.7. Masalah Kemiskinan

Penanganan prioritas yang keempat adalah permasalahan kemiskinan. Jumlah keluarga miskin di Kota Bogor tahun 2004 sebanyak 17.947 kepala keluarga atau 9,50 % yang harus segera ditanggulangi yaitu di Kelurahan Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan. Daerah ini merupakan daerah yang mempunyai kerawanan sosial yang sangat tinggi. Kriteria miskin berdasarkan BKKBN meliputi 1) tidak bisa makan 2 kali sehari atau tidak mampu makan protein hewani satu kali dalam seminggu; 2) tidak mempunyai penghasilan tetap minimal sebesar Rp. 150.000,00/kapita/bulan; 3) tidak mampu menyekolahkan anak usia 7-15 tahun; 4) tidak mampu berobat dan KB ke Puskesmas; dan 5) kondisi rumah berlantai tanah 75 % dari luas rumah.

Kemiskinan struktural yang terjadi di Kota Bogor pada umumnya disebabkan orang miskin tidak mampu menjangkau pasar kerja, alokasi APBD untuk penanganan tenaga kerja orang miskin belum optimal, iklim usaha saat ini belum mampu menunjang terhadap penyerapan tenaga kerja masyarakat miskin, kurangnya pengembangan SDM masyarakat miskin, alokasi dana-dana di luar pemerintah belum mampu dijangkau masyarakat miskin, belum efektifnya pengelolaan ZIS, dan krisis ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Untuk itu perlu ada peningkatan belanja penanganan masyarakat miskin.

3.7.1. Penanganan Masalah Mendasar

Selain isu-isu tersebut diatas yang menjadi prioritas pembangunan, juga terdapat permasalahan yang perlu penanganan berkaitan dengan kewenanganan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor, antara lain sebagai berikut :

1. Belum meratanya informasi rencana tata ruang bagi masyarakat dalam melakukan investasi dan pembangunan, sehingga tidak terkendalinya perkembangan fisik baik dari segi tata ruang dan tata bangunan.
2. Cukup besarnya proporsi tanah yang belum memiliki sertifikat dikarenakan biaya administrasi sertifikat tanah masih memberatkan sebagian besar penduduk, juga prosedur persertifikatan masih menyulitkan masyarakat.
3. Masih rendahnya tekanan publik terhadap pemanfaatan sumber daya alam sungai yang disebabkan tidak tegasnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang mengakibatkan kerusakan sumber daya alam serta beban pencemaran akibat limbah cair dan sampah rumah tangga.
5. Walaupun masyarakat telah menyelenggarakan sebagian jasa prasarana lingkungan seperti pembangunan jalan, jembatan dan lainnya, namun masih diperlukan peran pemerintah daerah dalam menyediakan prasarana khususnya yang bersifat keperintisan guna mendorong berkembangnya perekonomian dan membuka keterisolasian wilayah yang bersangkutan.
6. Permasalahan dibidang pendidikan masih banyak anak usia sekolah dasar yang rawan putus sekolah dan belum tertanganinya anak putus sekolah. Pada kelompok usia pendidikan SMP dan SMA faktor ekonomi keluarga merupakan penyebab yang paling menonjol sehingga banyak diantaranya yang memilih bekerja dibanding melanjutkan sekolah ke yang lebih tinggi. Sedangkan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, guru memegang peranan yang sangat menentukan. Oleh karena itu untuk meningkatkan akademik dan profesionalisme guru perlu ditingkatkan.
7. Dibandingkan dengan sekolah umum, madrasah relatif tertinggal baik dari segi mutu, manajemen maupun

- kelembagaan. Rendahnya kualitas pendidikan di madrasah umumnya disebabkan oleh kurangnya sarana prasarana dan minimnya fasilitas pendukung serta mutu tenaga kependidikan.
- 8. Dibidang kesehatan, walaupun persebaran sarana kesehatan khususnya puskesmas sebagai pelayanan kesehatan dasar secara fisik telah dikatakan merata, namun demikian belum sepenuhnya dengan peningkatan mutu pelayanan dan keterjangkauan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan dalam upaya kesehatan masih kurang mengutamakan pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pencegahan penyakit.
 - 9. Dibidang kependudukan, yaitu kondisi kependudukan belum optimal antara lain besarnya jumlah penduduk secara absolut dan tingkat kesejahteraan keluarga relatif rendahnya produktivitasnya, sehingga keluarga sebagai wahana pertama untuk meningkatkan kualitas penduduk akan berpengaruh pada peningkatan kualitas penduduk.
 - 10. Walaupun untuk menunda memiliki anak dan menjarangkan jumlah anak cukup tinggi di kalangan masyarakat, namun hanya berkisar tentang alat dan obat kontrasepsi belum kepada peningkatan kualitas kesehatan reproduksi.
 - 11. Jumlah angkatan kerja yang sangat besar belum diimbangi dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Disisi lain terdapat ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan pasar kerja, sehingga jumlah pengangguran cukup tinggi. Disamping itu masih terdapatnya hubungan antara pekerja dan pengusaha yang belum harmonis sehingga dapat menimbulkan gejolak ketenagakerjaan.
 - 12. Kurang tersedianya wacana-wacana baru yang dapat mengembangkan bakat, minat dan inovasi pemuda dalam berkreasi dan berprestasi dalam berbagai bidang pembangunan.
 - 13. Kemampuan pembina, pelatih dan penggerak olahraga perlu ditingkatkan, terutama lemahnya kedulian masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pendanaan olahraga.
 - 14. Permasalahan sosial dan penyakit masyarakat secara tajam berdampak kepada menurunnya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat dan penurunan kemampuan penyediaan

- sumber dari pemerintah dan masyarakat untuk menangani permasalahan sosial dan penyakit masyarakat.
- 15. Rendahnya pendidikan perempuan dan ketidaksetaraan jender ditunjukan oleh rendahnya akses mereka terhadap sumberdaya pembangunan.
 - 16. Pemahaman dan penerapan budaya daerah melalui jalur pendidikan, keluarga dan masyarakat belum berjalan secara optimal. Disisi lain globalisasi yang seharusnya menjadi peluang untuk memperkaya budaya dapat pula melunturkan budaya daerah. Sedangkan banyaknya peninggalan sejarah, purbakala dan kesenian yang sangat berharga yang dapat dimanfaatkan sebagai aset ekonomi maupun menjadi wahana pendidikan belum dimanfaatkan secara optimal.
 - 17. Permasalahan usaha industri rumah tangga, kecil dan menengah yaitu kapasitas produksi masih jauh dari optimal akibat sulitnya akses ke modal kerja serta menurunnya daya beli masyarakat akibat belum membaiknya ekonomi secara nasional. Dalam upaya pengembangan koperasi dan UKM belum berkembangnya institusi pendukung yaitu penyediaan jasa teknologi, jaringan pemasaran dan penjaminan permodalan.
 - 18. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani akibat tidak meningkatnya produksi dan daya saing komoditas pertanian di pasaran.
 - 19. Lemahnya penerapan nilai-nilai budaya hukum dan kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan mengakibatkan masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Disamping itu rendahnya profesionalitas dan integritas moral penegak hukum juga mempengaruhi jalannya budaya hukum dan penegak hukum.
 - 20. Belum optimalnya pemantapan otonomi daerah baik dalam manajerial maupun teknis dalam waktu cepat, antara lain belum optimalnya mekanisme partisipasi masyarakat serta rendahnya kepastian keuangan daerah dibandingkan dengan tanggung jawab yang semakin besar.
 - 21. Banyaknya penyakit masyarakat yang lain seperti PSK, Pengemis dan Gelandangan, perjudian, togel, dan Narkoba. Namun untuk masalah perjudian karena ini merupakan tindakan kejahatan maka Pemerintah Daerah Kota Bogor tidak mempunyai kewenangan dalam penindakan , ini sudah menjadi kewenangan pihak yang berwajib atau polisi.

BAB IV

PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan program penanggulangan masalah kemiskinan dan menjadi salah satu program prioritas pembangunan Kota Bogor. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat banyak dibentuk sebagai upaya pemerintah mengatasi masalah krisis ekonomi yang dimulai tahun 1997. Banyak bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, tapi pada penulisan disini lebih ditekankan pada empat program yaitu Dakabalarea, Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Garda Emas), Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Kelompok Usaha Bersama keluarga miskin (KUBE).

4.1 Konsep Program Dakabalarea

Program dakabalarea merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat Jawa Barat dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi serta lembaga ekonomi rakyat lainnya melalui penyediaan kredit dengan sistem pendampingan dan syariah. Program dakabalarea dibentuk dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat Jawa Barat, serta kaitannya dengan antisipasi terhadap akibat krisis ekonomi, peran dan fungsi usaha mikro/kecil dan koperasi diberdayakan serta mendapat prioritas.

Program ini pertama kali dicanangkan dan dioperasionalkan di Kecamatan Kesomalang Kabupaten Subang pada tanggal 4 Agustus 1999 melalui keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 32 Tahun 1999 tentang Kredit Dakabalarea. Pada saat pertama kali dioperasionalkan, dana awal yang dialokasikan adalah sebesar Rp 2.5 miliar yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

DAKABALAREA itu sendiri punya arti sebagai berikut: DA (dahareun loba), KA (kabeuli ku rakyat), BA (barudak bisa sakola tur rakyat jagjag waringkas), LA (layanan umur ningkat), RE (reformasi dilaksanakeun) dan A (anu miskin ngurangan tur nu iman jeung nu taqwa nambahan).

Kredit Program Dakabalarea ditujukan sebagai salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha skala mikro, kecil, menengah serta kopersai melalui penyediaan permodalan.

Dalam implementasinya, program Dakabalarea melibatkan Bank Jabar Syariah dan Dekopinwil Jawa Barat. Kerjasama dilakukan dalam hal penyaluran dan penatausahaan penerusan pinjaman untuk kelompok peminjam dengan prinsip bagi hasil dan jual beli.

4.1.1. Dasar Hukum

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peningkatan Pelaksanaan Kebijaksanaan Khusus Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mengenai Program Dakabalarea dalam rangka Penyelamatan Masyarakat Jawa Barat dari krisis sosial ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 32 Tahun 1999 tanggal 15 Juli 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Dakabalarea.
- b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Dakabalarea.
- c. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan PT. Bank Pembangunan Jawa Barat Nomor 235/DIR/1999 tanggal 4 Agustus 2003 jo. 01A/DIR/2000 581/02/Perek tanggal 17 Pebruari 2000 jo. 581 /103/ Sarek 01/DIR/2000 22A/DIR-UUS/2003 tanggal 4 Agustus 2003 tentang Penyaluran dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman untuk Peminjam dan Kelompok Peminjam dengan prinsip bagi hasil dan jual beli (Kredit Program Dakabalarea).

4.1.2. Sasaran

Sasaran Kredit Program Dakabalarea adalah tercapainya peningkatan dan pengembangan usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi yang dikelompokan dalam suatu kelompok peminjam baik berupa perorangan, koperasi atau kelompok usaha

lainnya, yang memenuhi syarat teknis perbankan/feasible dengan rencana usaha di bidang agribisnis, industri, perdagangan dan jasa lainnya.

4.1.3. Prinsip-prinsip Kredit Program Dakabalarea

Dalam keberhasilan Kredit Program Dakabalarea harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu TRISUKSES DAKABALAREA (Sukses Penyaluran, Sukses Pemanfaatan dan Sukses Pengembalian), rinciannya sebagai berikut:

1. Sukses Penyaluran yaitu penyaluran harus tepat sasaran, tepat jumlah dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Sukses Pemanfaatan yaitu Kredit Dakabalarea harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya serta dapat memajukan usaha penerima.
3. Sukses Pengembalian yaitu dana ini merupakan amanat yang harus dikembalikan (pinjaman bukan hibah), pengembalian harus tepat waktu dan tepat jumlah karena pemohon kredit lainnya sudah menunggu.

Jenis-jenis kredit program Dakabalarea adalah:

1. Daka umum (kredit yang disalurkan untuk umum)
2. Daka Kopontren (kredit yang diarahkan untuk pengembangan usaha dilingkungan pondok pesantren)
3. Kredit ormas islam sebagai pilot projek pemberdayaan ekonomi melalui ormas-ormas islam
4. Daka PKK (kredit untuk anggota PKK dan dikelola oleh PKK)
5. Kredit yang diperuntukkan bagi anggota Pasundan Istri (PASI)
6. Kredit untuk Koprasi Inkubator Agribisnis (KIA) Jawa Barat
7. Daka PIM (kredit untuk pelaku industri manufaktur skala kecil)
8. Daka Agribisnis Indagro (kredit bagi kelompok tani dibawah agribisnis Jawa Barat)
9. Kredit program bagi nelayan perorangan atau kelompok
10. Kredit bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
11. Kredit bagi petani tebu
12. Daka Kessos (kredit bagi kesejahteraan sosial)
13. Kredit program Dakabalarea bagi PPTM

Jangka waktu kredit modal kerja maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali. Kredit investasi maksimal 3 tahun termasuk masa tenggang maksimal 6 bulan.

Dari pendapatan yang diperoleh nasabah, ditetapkan bagi hasil dengan besaran yang ditetapkan secara bersama antara bank dan nasabah. Adapun komposisi bagi hasil tersebut:

1. 10% diperuntukkan sebagai bagian hak Tim Teknis Provinsi
2. 10% diperuntukkan sebagai bagian hak Tim Kabupaten/Kota
3. 25% diperuntukkan sebagai bagian hak tenaga pendamping
4. 5% diperuntukkan sebagai bagian hak lembaga ekonomi
5. 50% diperuntukkan sebagai bagian hak akumulasi modal (berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat No. 10 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat no 32 tahun 1999 tentang Kredit Program Dakabalarea).

4.1.4. Indikator-indikator Keberhasilan Kredit Program Dakabalarea

Indikator keberhasilan Kredit Program Dakabalarea dapat diukur dari perkembangan penyaluran dan pemanfaatan kredit yang saat ini kredit telah digulirkan ke 2.941 kelompok dengan melibatkan 25.881 orang.

Dari kegiatan ekonomi masyarakat/usaha mikro kecil, menengah dan koperasi yang didanai Kredit Program Dakabalarea akan memberikan implikasi positif terhadap penyerapan tenaga kerja, yang pelaku usahanya masih didominasi oleh Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi dengan pencapaian 99% dari seluruh usaha di Jawa Barat.

Dari proses kegiatan usaha yang didanai oleh Kredit Dakabalarea akan menghasilkan output bagi meningkatnya kegiatan usaha yang pada akhirnya Pendapatan masyarakat akan semakin tinggi, daya beli meningkat serta bermuara pada tercapainya IPM Jawa Barat. Selain dari pada itu dampak positif lainnya dari kredit ini ialah meningkatnya kelembagaan ekonomi, serta terselamatkan dan kembalinya dana untuk digulirkan ke masyarakat secara merata.

4.2 Konsep Program Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Garda Emas)

Program Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Garda Emas) diluncurkan sebagai bentuk keprihatinan pemerintah Kota Bogor pada masyarakat kota Bogor yang terimbas krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997. Menurunnya daya beli masyarakat, tingginya pengangguran, meningkatnya jumlah rumahtangga miskin, serta pertumbuhan ekonomi yang negatif, mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan positif. Maka pada bulan Juli 1999 Pemerintah Kota Bogor bekerjasama dengan LSM Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) meluncurkan Program Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Garda Emas).

Garda Emas adalah upaya pemberdayaan yang dilakukan secara bersama-sama dan terarah dari, oleh dan untuk masyarakat di wilayah Kota Bogor melalui penggalian dan pengembangan potensi sumberdata ekonomi masyarakat untuk meningkatkan tingkat kualitas ekonomi masyarakat. Komitmen akhir dari Garda Emas adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan dengan menempatkan ekonomi masyarakat sebagai subyek program diharapkan terciptanya ketahanan ekonomi masyarakat yang kuat.

4.2.1 Tujuan.

Tujuan umum program Garda Emas adalah untuk membantu masyarakat khususnya kelompok sasaran, memberdayakan dirinya agar mempunyai kemampuan melakukan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya sehingga dapat lebih berperan dalam pembangunan daerah.

4.2.2 Sasaran program

Sasaran program Garda Emas adalah seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kota Bogor, secara khusus program ini diprioritaskan:

- a. Program pemberdayaan kelembagaan ekonomi, melalui merevitalisasi dan mendayagunakan lembaga ekonomi yang ada di masyarakat (koperasi, LPED, UED-SP dan BMT)

sehingga mampu menjadi pilar ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan.

- b. Program pemberdayaan usaha / pengusaha kecil (sasarannya pengusaha kecil dan mikro)
- c. Program penanggulangan penganggur (sasarannya adalah pengangguran korban PHK dan lainnya)
- d. Program khusus pemberdayaan keluarga miskin (sasarannya keluarga Pra KS, dan KS1) melalui bantuan modal bergulir dan usaha pendampingan / pembinaan usaha.

4.2.3 Indikator Keberhasilan.

Indikator untuk menilai keberhasilan dari program Garda Emas dapat dilihat dari aspek input dan output.

1. Indikator input:

- a. Adanya kebijakan pemerintah yang jelas tentang Garda Emas
- b. Adanya program-program yang berwawasan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada instansi pemerintah, swasta, LSM dan Ormas yang dapat dipafukan
- c. Adanya kesepakatan data aktual tentang sasaran prioritas dan rencana terpadu garda emas.

2. Indikator output:

- a. Peningkatan jumlah dan persentase masyarakat sasaran yang ikut berperan atau terlibat dalam program ini setiap tahunnya.
- b. Peningkatan keterampilan dan akses berusaha pada kelompok sasaran
- c. Berkurangnya jumlah penganggur, keluarga para KS dan KS1 di wilayah Kota Bogor
- d. Peningkatan lapangan kerja dan peluang usaha baru
- e. Peningkatan pendapatan keluarga dari kelompok sasaran
- f. Meningkatnya kemandirian penerima sasaran
- g. Keberhasilan pengembangan dan pengaturan usaha dari setiap kelompok sasaran

4.3 Konsep Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

P2KP atau Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan merupakan upaya menumbuhkan gerakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang dimulai sejak Tahun 1999. P2KP dilakukan dengan membangun lembaga kepemimpinan kolektif warga di tingkat Kelurahan/Desa yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), agar pada masa berikutnya upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

P2KP dalam pelaksanaannya menggunakan strategi dalam bentuk fasilitasi untuk perubahan sikap prilaku masyarakat, melalui metoda pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan proses transformasi sosial secara bertahap dari masyarakat miskin menuju masyarakat berdaya, masyarakat mandiri dan akhirnya tatanan masyarakat madania.

P2KP memberikan konsep alternatif penanggulangan kemiskinan di perkotaan, dengan pendekatan, substansi dan konsep dasar P2KP yang berbasis pembelajaran nilai-nilai universal kemanusiaan (gerakan moral), nilai-nilai sosial kemasyarakatan (modal sosial) dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan Tridaya.

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan proyek pemerintah yang secara sustansi berupaya memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat dibangun "gerakan bersama" dalam menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan di wilayah bersangkutan.

Pada P2KP, dana BLM (Bantuan Langsung ke Masyarakat) ditempatkan sebagai dana stimulan atau pelengkap dari prakarsa dan keswadaayaan masyarakat untuk menaggulangi masalah kemiskinan.

4.3.1 Prinsip

Secara umum, sebagai program pemberdayaan masyarakat, maka prinsip dasar Program P2KP yakni berbasis nilai universal yang sinergis dan harmonis dengan nilai-nilai lokal masyarakat

setempat. Untuk itu Prinsip-prinsip pelaksanaan Program adalah sbb:

1. "Pemberdayaan Manusia Seutuhnya" untuk menumbuhkan perilaku kebersamaan, kepedulian, kerelawanan dan berpihak pada masyarakat miskin dengan dilandasi keikhlasan memberikan prioritas kepada warga yang lebih menderita, lebih miskin dan lebih parah kondisinya, sebagai perwujudan dari nilai-nilai universal sbb:
 - a. Nilai-nilai luhur kemanusiaan (perilaku/moral), yakni jujur, ikhlas, peduli, serta dapat dipercaya
 - b. Nilai-nilai kemasyarakatan (modal sosial), yakni kebersamaan, solidaritas sosial, gotong royong, kekeluargaan serta kesatuan dalam keragaman;
 - c. Prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni pelestarian lingkungan, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial (pendidikan, kesehatan, dll) yang adil intra dan inter generasi.
2. Menghargai dan mensinergikan karakteristik khas dari lembaga, budaya dan nilai-nilai Lokal yang sesuai dengan nilai-nilai universal.
3. Kesinambungan dan keberlanjutan upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan atas prakarsa dan inisiatif pemda, maupun kegiatan CBD lainnya yang telah dilaksanakan.

4.3.2 Tujuan

Tujuan P2KP dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui program pinjaman dana bergulir adalah:

- a. Mendorong proses pembelajaran masyarakat miskin dalam menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, maupun kegiatan produktif lainnya.
- b. Meningkatkan jangkauan pelayanan terhadap masyarakat miskin yang tidak memiliki penghasilan dan/atau relatif berpendapatan rendah dari kelompok sasaran.

- c. Membuka akses bagi usaha kecil dan para pengusaha kecil yang selama ini tidak mendapatkan akses dan belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal yang sudah ada.
- d. Memberikan kontribusi terhadap tujuan umum P2KP yakni membantu penanggulangan kemiskinan, melalui kegiatan pinjaman bergulir.
- e. Mengurangi kesenjangan antara sisi penawaran (*supply side*) yang terbatas dan sisi permintaan (*demand side*) yang masih belum dapat dilayani secara keseluruhan. Khususnya oleh lembaga keuangan formal.

4.3.3 Pendekatan

Agar terwujud tujuan yang hendak dicapai dalam Program P2KP maka pendekatan yang akan dilakukan adalah:

- 1. Pembelajaran dan pelembagaan pendekatan serta metodologi P2KP kepada masyarakat dan pemda untuk mewujudkan pola-pola pembangunan partisipatif yang berorientasi masyarakat miskin dan berkeadilan, melalui:
 - a. Aktualisasi nilai-nilai universal yang menekankan proses pemberdayaan sejati (manusia-manusia-nya) yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan nilai-nilai lokal, dalam rangka mewujudkan Masyarakat Mandiri yang mampu melaksanakan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan permukiman secara berkelanjutan
 - b. Pembangunan bertumpu pada kelompok (CBD) melalui penguatan lembaga pelaksana kegiatan masyarakat (TPP) yang transparan dan akuntabel untuk mampu optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin di wilayahnya sesuai prinsip dan nilai P2KP
 - c. Perencanaan Partisipatif dalam menyusun PJM-Pronangkis berorientasi pada peningkatan IPM-MDGs dengan pendekatan Tridaya (meliputi lingkungan, sosial, dan ekonomi) oleh Masyarakat Desa Adat agar upaya penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat dapat dilakukan secara komprehensif.
- 2. Penguatan peran dan kapasitas Pemda yang lebih mandiri dalam pelaksanaan replikasi P2KP khusus wilayah Bali, melalui:

- a. Revitalisasi dan Penguatan TKPK-D sehingga mampu menyusun SPK-D dan PJM Pronangkis kota melalui proses pengembangan KBP yang efektif
- b. Peningkatan kontribusi Pemda dalam pengembangan kapasitas (pelatihan dan lokakarya), bantuan teknis, biaya pendamping (Korkot, asisten korkot, Fasilitator, dll), serta Biaya Operasional
3. Menyediakan stimulan BLM Replikasi P2KP khusus Bali secara transparan dalam APBD dalam rangka optimalisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan yang mudah dilakukan oleh masyarakat dan membuka kesempatan kerja, melalui:
 - a. Pembangunan sarana/prasarana lingkungan
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial
 - c. Pengembangan ekonomi lokal dengan prasyarat tertentu
4. Memperkuat potensi keberlanjutan dan kemandirian program replikasi khusus Bali, melalui:
 - a. Menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat melalui proses penyadaran kritis, partisipatif, pengelolaan hasil-hasilnya, dan lainnya.
 - b. Pelembagaan pendekatan dan metodologi pembangunan bertumpu pada masyarakat pada pelaksanaan program-program Pemda selanjutnya
 - c. Meningkatkan kemampuan perangkat pemerintah dalam perencanaan, penganggaran, dan pengembangan paska program untuk efektifitas perencanaan dan penganggaran yang lebih berorientasi pada masyarakat miskin dan berkeadilan.

4.3.4 Strategi

Strategi yang dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah:

- a. Menguji kelayakan BKM/UPK, KSM maupun anggota dengan menggunakan instrumen kriteria kelayakan.
- b. Memberikan pelatihan pendahuluan pada BKM sebelum dana pinjaman bergulir diluncurkan.

- c. Memberikan pelatihan dasar pengelolaan pinjaman bergulir bagi calon manajer dan staf pengelola UPK.
- d. Memberikan pendampingan dan konsultasi dalam rangka memperkuat kemampuan pengelolaan pinjaman bergulir kapada BKM/UPK
- e. Mengembangkan sistem monitoring dan pengawasan pengelolaan pinjaman bergulir sebagai upaya melakukan perbaikan terus menerus.
- f. Mendorong terjadinya pelatihan ditingkat kelompok pemanfaat pinjaman baik pelatihan dasar sebelum kelompok menerima pinjaman maupun pelatihan pengembangan usaha.
- g. Memfasilitasi akses NKM/UPK terhadap sumberdaya luar yang ada baik menyangkut dukungan keuangan maupun bantuan teknis khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan pinjaman bergulir.

4.3.5 Kelompok sasaran

Kelompok sasaran P2KP adalah masyarakat miskin yang kriterianya ditentukan sendiri oleh masyarakat setempat. Kelompok sasaran tersebut adalah keluarga yang:

- 1. Akan mulai usaha baru
- 2. Sudah mempunyai usaha kecil yang layak dikembangkan dan memberikan kontribusi bagi penciptaan peluang usaha serta kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan.
- 3. Kebutuhan pinjaman untuk modal pertama tidak lebih dari Rp 500.000 sedangkan selanjutnya maksimal sebesar Rp 2000.000.
- 4. Memiliki motivasi dan tanggung jawab tinggi untuk mengembalikan pinjamannya.
- 5. Tidak mempunyai akses atau belum terjangkau pelayanan lembaga keuangan.

4.3.6 Pendampingan Peningkatan Peran dan Kapasitas Pemda

Komponen ini merupakan bantuan teknik P2KP kepada pemerintah kota/ kabupaten di Bali yang melaksanakan replikasi P2KP. P2KP akan memfasilitasi dan mengendalikan fasilitator-fasilitator pendamping serta koordinator kota dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah daerah.

Adapun ketentuan bantuan teknis P2KP adalah sebagai berikut:

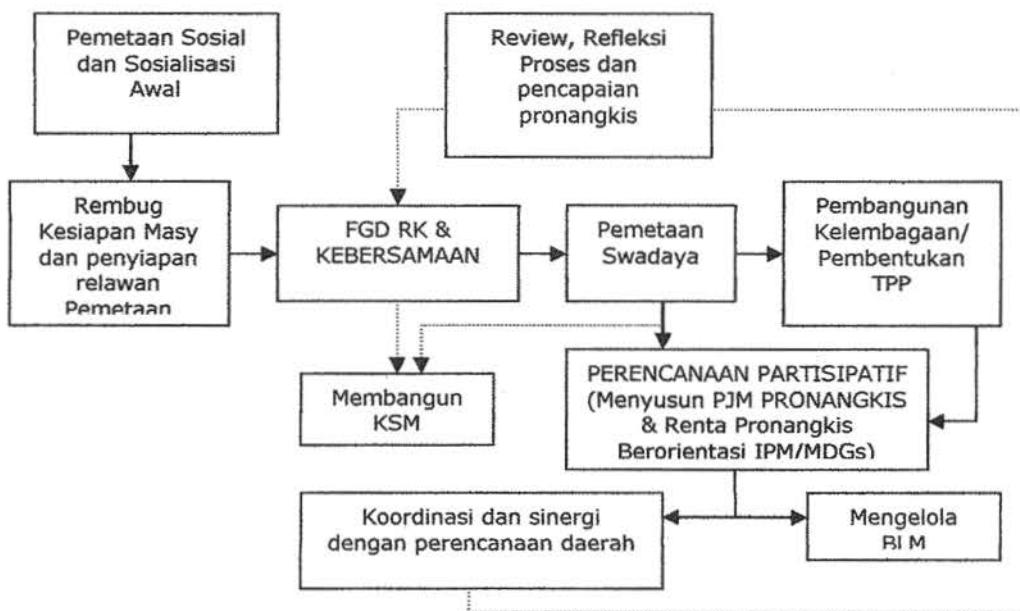
Tabel 4.1 Ketentuan bantuan teknis P2KP

Aspek	Pemda	P2KP
Pendampingan Pemda dalam Pemberdayaan Masyarakat berbasis nilai-nilai universal dan nilai-nilai lokal	<ul style="list-style-type: none">♦Seleksi & penugasan Korkot, Askorkot, Fasilitator sesuai ketentuan P2KP (mengacu pada pedoman khusus Replikasi P2KP, <i>terlampir</i>)♦Menyiapkan dana kegiatan sosialisasi, pelatihan dan <i>coaching</i> fasilitator♦Membayai Honor Korkot, Askorkot, Fasilitator dan <i>Fix cost</i> yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none">♦Menempatkan konsultan provinsi Bali di bawah KMW P2KP♦Menyiapkan Pemandu dan Nara SumberPelatihan/<i>coaching</i> Fasilitator termasuk modul-modulnya♦Menyiapkan pedoman & sosialisasi kit untuk Fasilitator/Masyarakat
Penguatan TKPK-D dalam menyusun SPK-D dan Pronangkis Kota	<ul style="list-style-type: none">♦Menyiapkan dan Melaksanakan pelatihan dasar P2KP bagi masyarakat serta lokakarya orientasi P2KP tingkat kota/kabupaten♦Melaksanakan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP)♦Menyiapkan dana operasional untuk KBP dan TKPKD dalam proses menyusun SPK-D & Pronangkis kota/kabupaten♦Menyediakan Asmandat pemda♦Menyiapkan perangkat dan operator komputer utk keperluan SIM Replikasi P2KP	<ul style="list-style-type: none">♦Menyiapkan Pemandu dan Nara Sumber serta modul-modul untuk pelatihan dan lokakarya kota/kab♦Melakukan rapat koordinasi secara rutin dengan korkot dan pemda♦Menyiapkan pedoman dan SOP KBP serta SPK-D dan Pronangkis Kota/kabupaten♦Mendampingi kegiatan KBP & TKPK-D menyusun SPK-D & Pronangkis kota/kabupaten♦Menyiapkan Pedoman dan SOP SIM P2KP serta melatih operator SIM pemkot/kab terkait P2KP

Secara rinci bentuk-bentuk bantuan pendampingan untuk pemerintah daerah, antara lain mencakup:

1. Pertemuan/musyawarah di tingkat pemerintah daerah dan kelompok peduli, baik bersifat rapat, diskusi tematik maupun sosialisasi
2. Pelatihan dan bimbingan, termasuk penyediaan bahan dan media belajar
3. Penyediaan media-media sosialisasi
4. Kunjungan lapangan baik dalam rangka pendalaman pemahaman maupun penggalian aspirasi masyarakat
5. Pengorganisasian Monitoring, Fasilitasi, Supervisi dan Evaluasi bersama, dll.

Adapun siklus dasar P2KP dapat dilihat pada Gambar 4.1 dibawah ini.



Gambar 4.1. Siklus Dasar P2KP

3.3.7 Indikator Keberhasilan.

Indikator keberhasilan tingkat UPK akan diukur dari enam variabel:

1. Rasio resiko saldo kredit
2. Rasio kecukupan cadangan resiko kredit
3. Rasio laba dibanding rata-rata aktiva produktif perbulan.
4. Rasio biaya dibanding pendapatan operasional
5. Rasio saldo kredit dibanding dengan total aktiva
6. Rasio aktiva bersih dibanding dengan modal awal

4.4 Konsep Program Kelompok Usaha Bersama keluarga miskin (KUBE)

Program Kelompok Usaha Bersama keluarga miskin (KUBE) adalah program penanggulangan kemiskinan melalui usaha ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga miskin (Gakin).

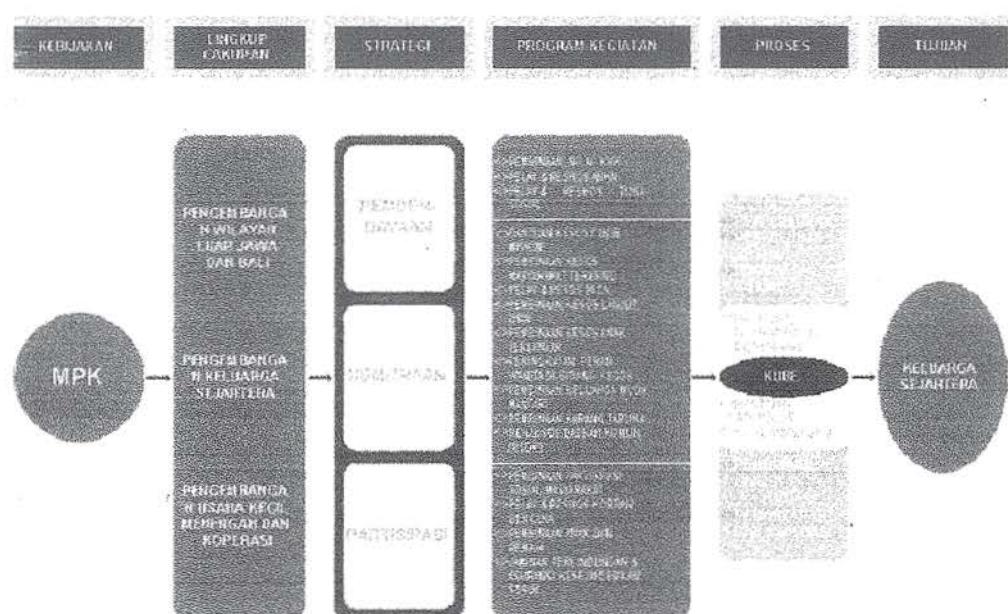
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan PROKESOS untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya

KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses PROKESOS dalam rangka MPMK. KUBE tidak dimaksudkan untuk mengantikan keseluruhan prosedur baku PROKESOS kecuali untuk Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin yang mencakup keseluruhan proses. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan berusaha, bantuan stimulans dan pendampingan

Kelompok Usaha Bersama adalah himpunan keluarga miskin yang terdiri dari 5-20 keluarga miskin. Himpunan ini terbentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsa sendiri, saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan yujuhan meningkatkan produktivitas anggotanya dan meningkatkan relasi sosial.

Bentuk KUBE Gakin adalah kegiatan membeberikan pinjaman untuk modal usaha sebesar Rp 500000 (lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga miskin. Kegiatan pemberdayaan KUBE Gakin merupakan upaya meningkatkan pendapatan keluarga miskin yang terkait dengan lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro tersebut dibentuk oleh masyarakat pada tingkat kelurahan

dan bergerak dalam usaha simpsn pinjam dan merupakan channeling program KUBE. Nama lembaga keuangan mikro tersebut adalah Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP). Selain channeling dalam program pemberdayaan ini dilibatkan juga pendamping perorangan. Pendekatan KUBE dalam Penanggulangan Kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Pendekatan KUBE dalam Penanggulangan Kemiskinan

4.4.1 Tujuan

Tujuan program KUBE Gakin diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan melalui :

1. Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok
2. Peningkatan pendapatan
3. Pengembangan usaha
4. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar

4.4.2 Sasaran

Sasaran KUBE adalah keluarga miskin yang telah memiliki usaha atau mau dan mampu berusaha dan namanya tercantum dalam register keluarga miskin hasil pencatatan keluarga miskin oleh BPS dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Masing-masing kelurahan jumlah sasaran disesuaikan dengan kuaota. Adapun ciri lainnya adalah:

1. Keluarga Fakir Miskin yang dibina melalui Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir miskin
2. Kelompok Masyarakat Terasing yang dibina melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing.
3. Para Penyandang Cacat yang dibina melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
4. Lanjut Usia yang dibina melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
5. Anak Terlantar yang dibina melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar
6. Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang dibina melalui Program Peningkatan Peranan Wanita di Bidang Kesejahteraan Sosial
7. Keluarga Muda Mandiri yang dibina melalui Program Pembinaan Keluarga Muda Mandiri
8. Remaja dan Pemuda yang dibina melalui Program Pembinaan Karang Taruna
9. Keluarga Miskin di Daerah Kumuh yang dibina melalui Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).

4.4.3 Proses Pembentukan KUBE

Selain KUBE yang ditumbuhkembangkan (Tabel 4.2.) melalui Program Bantuan Kesejahteraan Fakir Miskin, langkah/kegiatan pokok pembentukan KUBE untuk sasaran PMKS lainnya adalah :

1. Pelatihan ketrampilan berusaha, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan praktis berusaha yang disesuaikan dengan minat dan ketrampilan PMKS serta kondisi wilayah, termasuk kemungkinan pemasaran dan pengembangan basil usahanya. Nilai tambah lain dari pelatihan adalah tumbuhnya rasa percaya diri dan harga diri PMKS untuk mengatasi

permasalahan yang dihadapi dan memperbaiki kondisi kehidupannya

2. Pemberian bantuan stimulan sebagai modal kerja atau berusaha yang disesuaikan dengan ketrampilan PMKS dan kondisi setempat. Bantuan ini merupakan hibah (bukan pinjaman atau kredit) akan tetapi diaharapkan bagi PMKS penerima bantuan untuk mengembangkan dan mengulirkan kepada warga masyarakat lain yang perlu dibantu
3. Pendampingan, mempunyai peran sangat penting bagi berhasil dan berkembangnya KUBE, mengingat sebagian besar PMKS merupakan kelompok yang paling miskin dan penduduk miskin. Secara fungsional pendampingan dilaksanakan oleh PSK yang dibantu oleh infrastruktur kesejahteraan sosial di daerah seperti Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS) dan Panita Pemimpin Usaha Kesejahteraan Sosial (WPUKS).

Tabel 4.2 Penumbuhan dan Pengembangan KUBE

No.	Sasaran program	Jumlah Anggota kuge	Tenggang waktu pembinaan (tahun)	Sasaran Kelompok
1.	Fakir miskin	10 kk/kube	3	Keluarga fakir miskin dengan pengeluaran <rp. 25.000,-/orang/bulan
2.	Masyarakat terasing	10 kk/kube	5	Masyarakat terasing yang telah dibina
3.	Keluarga muda mandiri	10 kk/kube	3	Keluarga muda yang miskin baru menikah berusia 20-30 tahun, pendidikan suami minimal sma, istri sd
4.	Wanita rawan sosial ekonomi	10 /kube	3	Wanita dalam keluarga miskin, baik sebagai anggota keluarga maupun kk
5.	Penyandang cacat	5/kube	3	Penyandang cacat (ringan/potensial)
6.	Anak terlantar	10 kk/kube	3	Anak terlantar dalam keluarga miskin usia 15-21 tahun
7.	Lanjut usia	10 anggota/ kube, dalam satuan pelayanan (karang wertha)	3	Lanjut usia (60 tahun) potensial dalam keluarga miskin
8.	Karang taruna	10 kk/kube	3	Karang taruna yang telah merintis usaha ekonomis produktif
9.	Reh. Sos daerah kumuh	10 kk/kube	3	Keluarga miskin dalam lingkungan rsdk>

4.4.4 Organisasi dan Manajemen

1. Kepengurusan KUBE
 - a. Pada hakekatnya KUBE dibentuk dari, oleh dan untuk anggota kelompok
 - b. Pengurus KUBE dipilih dari anggota kelompok yang mau dan mampu mendukung pengembangan KUBE, memiliki kualitas seperti kesediaan mengabdi, rasa keterpanggilan, mampu mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, mempunyai keuletan, pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta yang penting adalah merupakan hasil pilihan dari anggotanya
2. Keanggotaan KUBE
 - c. Anggota KUBE adalah PMKS sebagai sasaran program yang telah disiapkan. Jumlah anggota untuk setiap KUBE berkisar antara 5 sampai 10 orang / KK sesuai dengan jenis PMKS
 - d. Khusus untuk Pembinaan Masyarakat Terasing dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh pembentukan KUBE berdasarkan unit pemukiman sosial, artinya suatu unit pemukiman sosial adalah satu KUBE
2. Administrasi KUBE
 - a. Untuk dapat berjalan dan berkembangnya KUBE dengan baik, maka pengurus maupun pengelola KUBE perlu memiliki catatan atau administrasi yang baik, yang mengatur keanggotaan, organisasi, kegiatan, keuangan, pembukuan dan lain sebagainya
 - b. Catatan dan administrasi KUBE meliputi antara lain buku anggota, buku peraturan KUBE, pembukuan keuangan / pengelolaan hasil, daftar pengurus dan sebagainya

4.4.5 Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi

1. Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penumbuhan dan pengembangan KUBE, disamping meningkatkan motivasi dan kemampuan pelaksanaan dilapangan serta kapasitas manajemen pengelola KUBE. Pembinaan dilaksanakan oleh petugas sosial wilayah

- mulai dan tingkat propinsi, kabupaten / kodya, kecamatan dan desa / kelurahan secara berjenjang
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan KUBE dan permasalahan yang merupakan hambatan serta upaya pemecahannya, sehingga upaya penumbuhan dan pengembangan KUBE berjalan sesuai dengan rencana
 3. Kegiatan monitoring dan evaluasi beserta pelaporannya dilaksanakan melalui mekanisme secara berjenjang mulai dan tingkat desa, kecamatan, kabupaten / kodya, propinsi dan pusat dalam koordinasi Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) PROKESRA secara berjenjang.

4.4.6 Dana Stimulan

Stimulan untuk pinjaman modal usaha kepada keluarga miskin sebesar Rp 500000 yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 10 bulan dengan tambahan 10% untuk bantuan operasional pendamping.

4.4.7 Indikator keberhasilan

Tolak ukur keberhasilan program KUBE adalah apabila pengembalian pinjaman sebesar 50%. Dengan asumsi:

1. 20% usahanya macet
2. 30% usahanya tetap jalan tetapi tidak bisa mengembalikan
3. 50% usahanya jalan dan pengembalian lancar.

BAB V

KONDISI SAATINI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KOTA BOGOR

Kondisi saat ini (*existing condition*) program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Bogor (Program Dakabalarea, Garda Emas, P2KP dan KUBE) dilihat dari beberapa aspek yaitu dana bergulir (baik yang dikucurkan, yang digunakan maupun sisa), biaya operasional, total penggunaan dana (merupakan penjumlahan dari dana bergulir yang digunakan dengan biaya operasional), jumlah penerima program serta tingkat pengembalian modal (Tabel 5.1).

5.1 Program Dakabalarea

5.1.1 Total Dana Yang Digunakan

Dana Bergulir. Besarnya dana yang digulirkan berbeda antar program. Dari Tabel 2 terlihat bahwa pada program Dakabalrea dana sudah dgulirkan sebesar Rp. 576.400.000. Program Dakabalarea ini terdiri dari 3 sub program yaitu Daka Umum, Daka PIM dan Daka PKK. Daka Umum dimulai tahun 1999 dengan kucuran dana bergulir sebesar Rp 399400000,-. Pada tahun 2002 digulirkan sub program baru yaitu Daka PIM dan Daka PKK. Dana bergulir Daka PIM dikucurkan dalam dua tahap yaitu tahap pertama pada tahun 2002 sebesar Rp. 128000000, dan tahap kedua pada tahun 2003 sebesar Rp. 49000000,-.. Dengan demikian total dana bergulir Dakabalarea yang merupakan penjumlahan dari modal usaha Daka Umum, Daka PIM dan Daka PKK adalah sebesar Rp. 676400000. Pada program dakabalrea ini tidak ada data dana bergulir yang tersisa, sehingga diasumsikan bahwa dana tersebut semuanya digunakan.

Tabel 5.1 Keragaan program Dakabalarea, Garda Emas, P2KP dan KUBE

Nama Program	Dana bergulir (x Rp 1000)			Biaya Operasional (Rp x 1000)	Total Penggunaan Dana (Rp x 1000)	jumlah penerima program (org)	tingkat pengembalian (%)
	yang dikucurkan	Sisa	Yang digunakan				
	a	b	c = a-b				
Dakabalarea	576400	NA	576400	100000	676400	243	66.29
Garda Emas	485350	101000	384350	150000	534350	553	80.57
P2KP	12900000	1480995,3	11419004,7	639150	12058154,7	23523	55.00
KUBE	3210000	1315364,3	1894635,7	656000	2550635,7	11210	61.35

NA : not available

Biaya operasional. Program Dakabalarea sudah mulai dilaksanakan dari tahun 1999, namun biaya operasionalnya baru ada mulai tahun 2006 yaitu sebesar Rp 50000000, dan pada tahun 2007 dikeluarkan lagi biaya operasional dengan jumlah yang sama yaitu Rp 50000000. Sehingga total biaya operasional program dakabalrea seperti terlihat pada Tabel a adalah sebesar Rp 100000000.

Total penggunaan dana. Total dana yang digunakan pada program Dakabalrea adalah sebesar Rp 676400000, yang terdiri dari dana bergulir yang digunakan sebesar Rp 576400000 dengan biaya operasional sebesar Rp 100000000.

5.1.2 Jumlah Penerima Program

Pada program Dakabalarea jumlah penerima program atau sasaran sebanyak 243 orang yaitu terdiri dari 230 orang sasaran program Daka Umum, dan 13 orang sasaran Daka PIM. Penerima program dari Daka PKK disertakan dalam analisis ini.

Unit Cost

Unit cost adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi satu rumah tangga. Unit Cost pada program Dakabalarea merupakan unit cost yang terbesar dibandingkan unit cost pada program lainnya. Unit cost pada program Dakabalrea sebesar Rp 2 783 539 atau merupakan hasil dari pembagian Total dana yang digunakan yaitu sebesar Rp 676400 dengan total jumlah penerima program yaitu sebanyak 243 rumah tangga.

Tingkat Pengembalian

Tingkat pengembalian modal usaha pada program Dakabalarea berbeda beda dari masing-masing sub programnya. Daka PIM mempunyai tingkat pengembalian tertinggi yaitu mencapai 85.58% dan yang terendah pada Daka Umum hanya sekitar 47%. Bila dirata-rata, maka tingkat pengembalian modal usaha pada program Dakabalarea sebesar 66.29%.

Rendahnya tingkat pengembalian pada program Daka Umum disebabkan oleh beberapa hal yaitu: 1) rendahnya kemampuan manajemen dan administrasi dari *channeling*, 2) kurangnya pengendalian dari bank penyalur program, dan 3) adanya kevakuman pendampingan pada tahun 2002 – 2005, yang

mengakibatkan tidak adanya pengawasan dan pengendalian program, sehingga permasalahan yang terjadi yang sudah berlangsung lama sangat sulit untuk diselesaikan. Program Garda Emas

Program Garda Emas

5.2.1 Total Dana Yang Digunakan

Dana bergulir. Total dana bergulir yang dikeluarkan selama tiga tahun dari tahun 2005-2007 adalah sebesar Rp 485350000, yang terdiri dari yang dikeluarkan tahun 2005 sebesar Rp 180200000, yang dikeluarkan tahun 2006 sebesar Rp 145950000 dan yang dikeluarkan tahun 2007 sebesar Rp 159200000. Dari total dana tersebut, yang sudah kembali sebesar Rp 101000000, sehingga dana perguliran yang digunakan sebesar Rp 384350000,-.

Biaya operasional. Pada program Garda Emas tercatat biaya operasional yang dikeluarkan selama tiga tahun yaitu dari tahun 2005 – 2007 sebesar Rp 150000000. Biaya operasional ini adalah jumlah biaya operasional yang dikeluarkan dari tahun 2005-2007 masing-masing sebesar Rp 50000000,-

Total penggunaan dana. Total dana yang digunakan pada program Garda Emas adalah sebesar Rp 534350000, yang terdiri dari dana bergulir yang digunakan sebesar Rp 384350000 dengan biaya operasional sebesar Rp 150000000.

5.2.2 Jumlah Penerima Program

Pada program Garda Emas jumlah penerima manfaata program atau sasaran sebanyak 553 orang yang terdiri dari 184 orang pada tahun 2005, 183 orang pada tahun 2006 dan 186 orang pada tahun 2007.

Unit Cost

Unit Cost pada program Garda Emas merupakan unit cost kedua terbesar dibandingkan unit cost pada program lainnya. Unit cost pada program Dakabalea sebesar Rp 966 2749 atau merupakan hasil dari pembagian Total dana yang digunakan pada program Garda Emas yaitu sebesar Rp 534 350 dengan total

jumlah penerima program Garda Emas yaitu sebanyak 553 rumahtangga.

Tingkat Pengembalian

Tingkat pengembalian dana bergulir/ modal usaha pada program Garda Emas berbeda beda antar tahun. Pada tahun 2005, tingkat pengembalian mencapai 75.19%, tahun 2006 79.79%, dan pada tahun 2007 tingkat pengembalian sebesar 86.73%. Maka rataan tingkat pengembalian dana bergulir pada program P2KP sebesar 80.57%.

Adanya 19.43% yang tidak mengembalikan dana bergulir yang dipinjamnya adalah karena usaha penerima program tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Program P2KP

5.3.1 Total Dana Yang Digunakan

Dana bergulir. Program P2KP pada tahun 1999/ 2000 mulai meluncurkan dana bergulir atau sering disebut BLM (Bantuan Langsung ke Masyarakat) sebesar Rp 9000000000,-, dan pada tahun 2003 dikucurkan lagi dana bergulir sebesar Rp 3900000000,-, sehingga total dana bergulir program P2KP yang dikeluarkan sebesar Rp 1290000000. Dari pengembalian dana bergulir, masih ada dana sisa sebesar Rp 1480995300, sehingga dana bergulir yang digunakan sampai saat ini sebesar Rp 11419004700.

Biaya operasional. Pada program P2KP tercatat biaya operasional yang dikeluarkan selama tiga tahun yaitu pada tahun 2005 sebesar Rp 239150000, pada tahun 2006 sebesar Rp 250000000 dan pada tahun 2007 dikeluarkan biaya operasional sebesar Rp 150000000,-. Total biaya operasional pada program P2KP sebesar Rp 639150000.

Total penggunaan dana. Total dana yang digunakan pada program P2KP adalah sebesar Rp 12058154700, yang terdiri dari dana bergulir yang digunakan sebesar Rp 11419004700 dengan biaya operasional sebesar Rp 639150000.

5.3.2 Jumlah Penerima Program

Jumlah penerima program pada P2KP merupakan yang terbanyak diantara program lainnya. Pada program P2KP jumlah penerima program atau sasaran sebanyak 23523 orang yang tegabung dalam 8328 KSM.

Unit Cost

Unit Cost pada program P2KP merupakan unit cost kedua terkecil dibandingkan unit cost pada program lainnya. Unit cost pada program P2KP sebesar Rp 512 611 atau merupakan hasil dari pembagian Total dana yang digunakan pada program P2KP yaitu sebesar Rp 12 058 155 dengan total jumlah penerima program P2KP yaitu sebanyak 23523 rumah tangga.

Tingkat Pengembalian

Tingkat pengembalian dana bergulir/ modal usaha pada program P2KP berbeda beda antar tahun. Pada tahun 2005, tingkat pengembalian mencapai 65%, tetapi pada tahun 2007 tingkat pengembalian menurun menjadi 40%. Bila dibuat rataan, maka rataan tingkat pengembalian dana bergulir / modal usaha pada program P2KP sebesar 55%.

Menurunnya tingkat pengembalian dana bergulir pada program P2KP disebabkan oleh beberapa hal yaitu: 1) pengelolaan yang kurang baik ditingkat BKM, 2) ada anggapan bahwa dana bergulir tersebut tidak perlu dikembalikan dan 3) kurang tepatnya sasaran penerima program.

5.4 Program KUBE

5.4.1 Total Dana Yang Digunakan

Dana bergulir. Program KUBE dalam 3 tahun terakhir menggulirkan modal usaha / dana bergulir untuk keluarga miskin sebesar Rp 3210000000, yang terdiri dari dana bergulir yang dikeluarkan pada tahun 2005 sebesar Rp 1020000000, pada tahun 2006 dikeluarkan sebesar Rp 690000000, dan pada tahun 2007 sebesar Rp 1500000000,-. Dari total dana perguliran tersebut, ada dana yang sudah terkumpul dari hasil pengembalian guliran sebesar Rp 1315364300, sehingga dana bergulir yang digunakan sebesar Rp 1894635700.

Biaya operasional. Biaya operasional program KUBE selama 3 tahun terakhir dari tahun 2005- 2007 adalah sebesar Rp. 656000000,- dengan rincian biaya operasional tahun 2005 sebesar Rp. 96000000,-, tahun 2006 sebesar Rp 310000000, dan tahun 2007 sebesar Rp 250000000.

Total penggunaan dana. Total dana yang digunakan pada program KUBE adalah sebesar Rp 2550635700, yang terdiri dari dana bergulir yang digunakan sebesar Rp 1894635700 dengan biaya operasional sebesar Rp 656000000.

5.4.2 Jumlah Penerima Program

Pada program KUBE jumlah penerima program atau sasaran sebanyak 11210 KK yang terdiri dari jumlah penerima program pada tahun 2004 sebanyak 2400 KK, tahun 2005 sebanyak 3400 KK, 2300 KK pada tahun 2006, dan 3000 KK pada tahun 2007 sebanyak 3000 KK.

Unit Cost

Unit Cost pada program KUBE merupakan unit cost yang terkecil dibandingkan unit cost pada program lainnya. Unit cost pada program KUBE sebesar Rp 227 532 atau merupakan hasil dari pembagian Total dana yang digunakan pada program KUBE yaitu sebesar Rp 2 550 635 dengan total jumlah penerima program KUBE yaitu sebanyak 11210 rumah tangga.

Tingkat Pengembalian

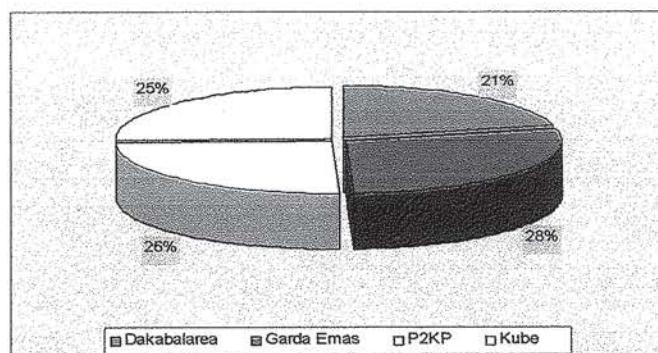
Seperti juga program lainnya, tingkat pengembalian dana bergulir/ modal usaha pada program KUBE berbeda beda antar tahun. Pada tahun 2005 tingkat pengembalian mencapai 68.7%, tetapi pada tahun 2006 tingkat pengembalian menurun menjadi 54%. Maka rataan tingkat pengembalian dana bergulir pada program KUBE sebesar 61.35%.

BAB VI

KERAGAAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM

6.1 Karakteristik Penerima manfaat program

Jumlah responden penerima program yang dijadikan contoh dalam penelitian ini hampir merata diantara empat program ini dengan total responden sebanyak 298 orang yang terdiri dari 63 orang (21.14%) penerima program Dakabalaera, 84 orang (28.19%) penerima program Garda Emas, 76 orang (25.5%) penerima program P2KP dan 75 orang (25.17%) merupakan penerima program KUBE (Gambar 5.1).



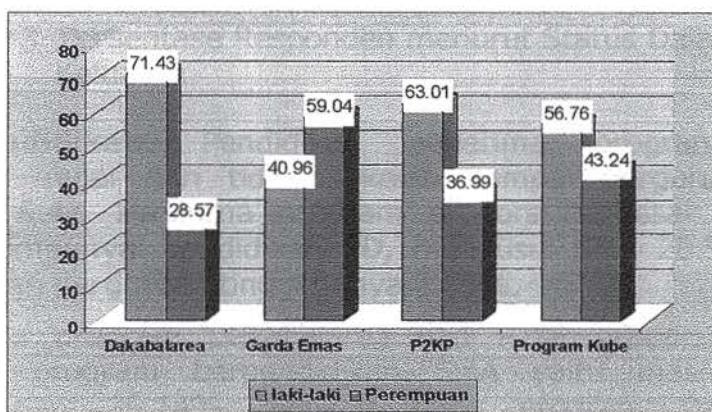
Gambar 6.1. Persentase Responden menurut Program yang Diterima

Umur. Umur responden pada umumnya berkisar antara 23 tahun sampai 85 tahun dengan rataan 45.7 ± 10.6 tahun (Tabel 6.1). Dari Tabel 6.1 terlihat bahwa penerima program pemberdayaan ekonomi paling muda adalah penerima program KUBE (23 tahun), namun demikian penerima program tertua pun adalah penerima program KUBE (85 tahun). Tetapi secara rataan umur penerima program berada pada usia dewasa lanjut (> 40 tahun).

Tabel 6.1 Statistik Umur Penerima program

Program	Umur (tahun)				
	n	mean	std	min	max
Dakabalaera	53	48.7	10.4	30.0	75.0
Garda Emas	79	43.0	10.5	24.0	71.0
P2KP	70	44.4	9.3	24.0	66.0
Program Kube	73	47.9	11.3	23.0	85.0
Semua program	275	45.7	10.6	23.0	85.0

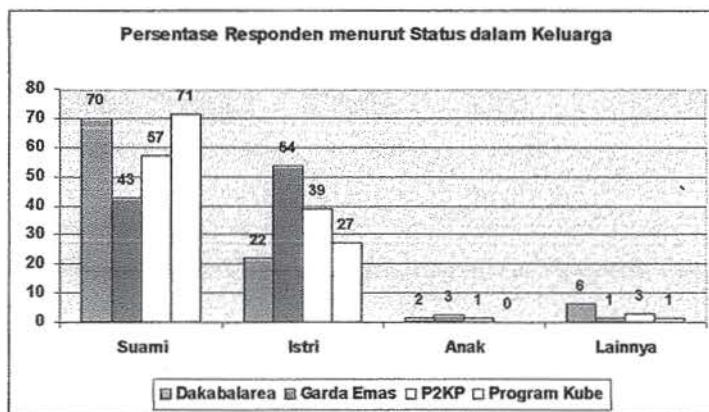
Jenis Kelamin. Bila didilihat dari keseluruhan program, maka penerima program sebagian besar (57%) adalah laki-laki dibandingkan perempuan hanya 43% (Gambar 6.2). Proporsi laki-laki terbesar ada pada penerima program Dakabalaera (71.43%), menyusul penerima program P2KP (63.01%) dan penerima program KUBE (56.76 %). Namun pada program Garda Emas terjadi sebaliknya, persentasi penerima program terbesar adalah perempuan (59.04%), dan laki-lakinya hanya 40.96 %.



Gambar 6.2 Persentase Responden menurut Jenis Kelamin

Status dalam keluarga. Status dalam keluarga dikategorikan dalam 4 kategori yaitu sebagai suami, istri, anak atau lainnya (sodara, mertua dan lainnya). Dari Gambar 6.3 terlihat bahwa sebagian besar (59.38%) penerima program berstatus sebagai suami, menyusul sebagai istri (36.46%), sebagai anak 1.39% dan lainnya 2.78%. Berdasarkan jenis program, pada program Dakabalaera, P2KP, dan KUBE sebagian besar yaitu masing-masing 69.84%, 56.94% dan 71.23% adalah

suami. Tapi kebalikannya, pada program Garda Emas sebagian besar (53.75%) penerima program adalah istri. Sedangkan status sebagai anak, meskipun ada yang menjadi penerima program, tetapi jumlahnya sedikit sekali, bahkan pada program KUBE tidak seorang pun anak yang menjadi penerima program.

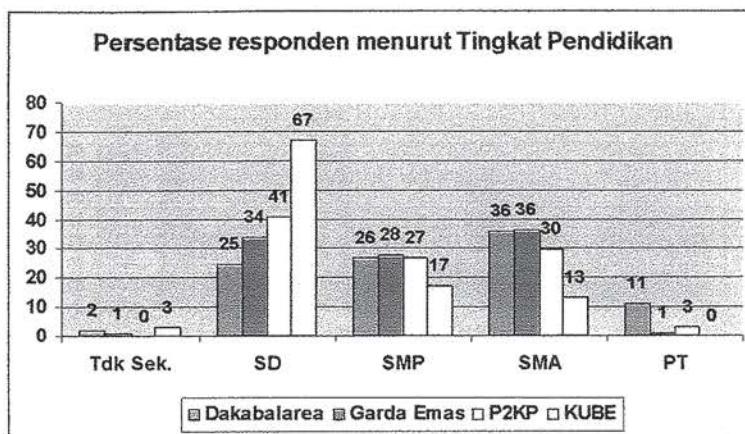


Gambar 6.3 Persentase Responden menurut Status Dalam Keluarga

Pendidikan. Pendidikan penerima program sangat bervariasi mulai dari tidak sekolah sampai perguruan tinggi (Gambar 6.4). Penerima program proporsi terbesar (42.24%) hanya mempunyai pendidikan SD, menyusul SMA 28.52%, SMP 24.55% dan perguruan tinggi hanya 3.25%.

Pada program Dakabalaera dan P2KP proporsi terbesar penerima program berpendidikan SMA yaitu masing-masing 35.85% dan 36.14%. bahkan pada program Dakabalaera penerima program berpendidikan perguruan tinggi relatif cukup tinggi atau tertinggi dibanding program lainnya yaitu mencapai 11.32%.

Pada program P2KP dan KUBE proporsi terbanyak penerima program berpendidikan SD yaitu masing-masing 40.85% dan 67.14%, bahkan pada program KUBE tidak ada satu orangpun penerima program berpendidikan prerguruan tinggi.



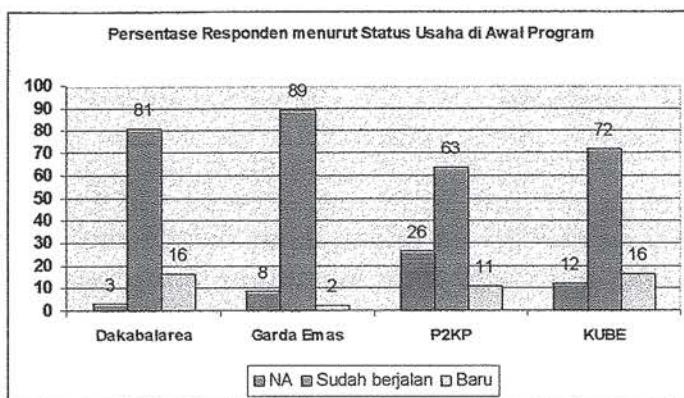
Gambar 6.4 Persentase Responden menurut Tingkat Pendidikan

6.2. Keragaan Usaha Penerima Manfaat Program

Keragaan usaha penerima program dibahas menurut sistem yaitu dari keragaan input, proses dan output. Faktor input keragaan usaha meliputi jenis usaha, ada tidaknya pelatihan, dan pemberian modal serta bunga. Faktor proses berupa ada tidaknya pendampingan, dan proses pengembalian modal, serta faktor output meliputi pendapatan/keuntungan yang diperoleh.

6.2.1 Input

Status Usaha. Kesiapan penerima program dalam menjalankan usahanya salah satunya ditentukan oleh sudah berjalannya usaha pada saat menerima pinjaman modal, atau dengan kata lain pinjaman modal usaha adalah untuk pengembangan dari usaha yang sudah berjalan. Namun dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini, setiap program memberi kesempatan juga pada yang baru akan berusaha, yang diharapkan usahanya dapat berjalan dengan baik dan dapat memperbaiki ekonomi keluarga. Keragaan penerima program berdasarkan status usaha awal dapat dilihat pada Gambar 6.5. Dari Gambar 6.5 terlihat bahwa sebagian besar (76.5%) penerima program statusnya sudah punya usaha.



Gambar 6.5. Persentase Responden berdasar Status Usaha di Awal Program

Jenis Usaha. Jenis usaha penerima program Dakabalarea, Garda Emas, P2KP dan Kube sangat bervariasi yaitu sebagai penjual baju, budi daya jamur, penjual rokok, penjual makanan, penjual sembako dan lainnya (Tabel 6.2).

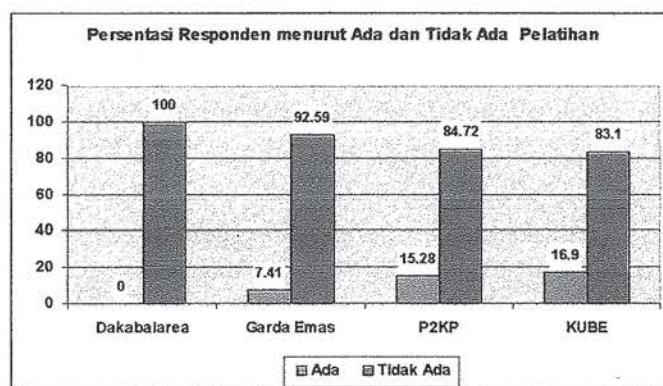
Tabel 6.2. Sebaran Responden menurut jenis usaha

No	Jenis Usaha	Dakabalarea		Garda Emas		P2KP		KUBE	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	Tidak ada data	9	14.29	8	9.52	26	34.21	20	26.67
2	Jual baju	-	-	3	3.57	-	-	-	-
3	Budi daya jamur	3	4.76	-	-	-	-	-	-
4	Menjahit	-	-	-	-	-	-	3	4.00
5	Rokok	-	-	3	3.57	-	-	2	2.67
6	Wiraswasta	-	-	3	3.57	-	-	-	-
7	Kredit barang	-	-	4	4.76	3	3.95	2	2.67
8	Sembako	11	17.46	18	21.43	11	14.47	5	6.67
9	Makanan	8	12.70	33	39.29	15	19.74	37	49.33
10	Bengkel	6	9.52	-	-	2	2.63	-	-
11	Usaha percetakan	13	20.63	-	-	-	-	-	-
12	Lain-lain	14	22.22	12	14.29	19	25.00	6	8.00
Total		63	100.00	84	100.00	76	100.00	75	100.00

Dari Tabel 6.2 terlihat bahwa jenis usaha penjual makanan seperti penjual gado-gado, mie ayam, bakso, gorengan, nasi dan

catering hampir di seluruh program (Dakabalarea, Garda Emas, P2KP dan KUBE) merupakan jenis usaha yang banyak dilakukan. Yaitu masing-masing sebesar 12.7%, 39.29%, 19.74% dan 49.33%. Jenis usaha lainnya yang banyak diusahakan adalah jualan sembako yaitu pada program Dakabalarea 17.46%, Garda Emas 21.43%, P2KP 14.47% dan KUBE 6.67%. Jenis usaha yang termasuk lain-lain adalah jenis usaha air minum isi ulang, bensin, fried chicken, jual hand phon, jual jam tangan, dagang kelontong, kredit barang pengrajin sandal.

Pelatihan. Penerima program ini ada yang mendapat pelatihan sebelum mereka mengembangkan usahanya, namun ada juga yang tidak mendapat pelatihan, tergantung kepada jenis programnya (Gambar 6.6).

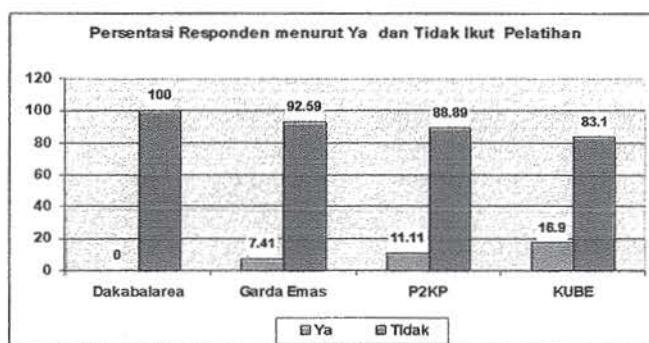


Gambar 6.6 Persentase Responden menurut Ada atau Tidak Ada Pelatihan

Dari Gambar 6.6 terlihat bahwa tidak semua program pemberdayaan ekonomi masyarakat mengadakan pelatihan dulu pada penerima manfaat program, seperti pada program Dakabalarea. Namun demikian meskipun pada program lainnya seperti pada program Garda Emas, P2KP, dan KUBE melakukan pelatihan dulu, namun pelatihan tersebut mungkin tidak dilakukan setiap saat program diluncurkan, sehingga ada 92.59% penerima program Garda Emas, 84.72% penerima program P2KP dan 83.10% pada KUBE menyatakan bahwa sebelum mengembangkan usaha tidak dilaksanakan pelatihan dulu.

Demikian pula penerima program yang ikut pelatihan, tidak semuanya ikut pelatihan yang diadakan oleh masing-masing

program (Gambar 6.7). Dari Gambar 6.7 terlihat bahwa dari seluruh penerima program Garda Emas, P2KP dan KUBE masing-masing hanya sebesar 7.41 %, 11.11% dan 16.90% yang ikut pelatihan sebelum mengembangkan usahanya. Sedangkan pada program Dakabalarea, karena memang tidak ada pelatihan sebelumnya, maka tidak ada satu orangpun yang terlibat pelatihan.



Gambar 6.7 Persentase Responden menurut Ya atau Tidak Ikut Pelatihan

Pemberian modal. Program Dakabalrea, Garda Emas, P2KP dan Kube merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, oleh karenanya salah satu legiatannya adalah memberikan modal usaha. Hal ini terbukti dari jawaban responden yang mengatakan bahwa seluruh responden menerima modal usaha dari program yang mereka ikuti (Tabel 6.3).

Tabel 6.3. Sebaran Responden menurut Ya atau Tidak Modal

Program	Ya		Tidak	
	n	%	n	%
Dakabalarea	63	100	0	0.0
Garda Emas	84	100	0	0.0
P2KP	76	100	0	0.0
Program Kube	75	100	0	0.0
Se semua Program	298	100	0	0.0

Besarnya modal yang diberikan pada peserta berbeda-beda mulai dari Rp 200.000 hingga Rp 6000.000 dengan rataan Rp $1.113.934 \pm Rp 940.132.9$ (Tabel 6.4). Dari Tabel 6.4 terlihat bahwa modal usaha yang diberikan program Dakabalarea antara Rp 300.000 hingga Rp 4.000.000, pada program Garda Emas

antara Rp 200.000 hingga Rp 2.000.000, pada program P2KP antara Rp 200.000 hingga Rp 6.000.000, dan pada program KUBE modal usaha yang diberikan antara Rp 200.000 hingga Rp 1.200.000.

Tabel 6.4 Statistik Besar Modal yang Diterima Penerima program

Program	Besar Modal yang Diterima (Rp)				
	n	mean	std	min	max
Dakabalaera	49	1632653	726904.9	300000	4000000
Garda Emas	80	866125	409233.6	200000	2000000
P2KP	72	1713194	1312024	200000	6000000
Program Kube	71	427464.8	136221.7	250000	1200000
Semua program	272	1113934	940132.9	200000	6000000

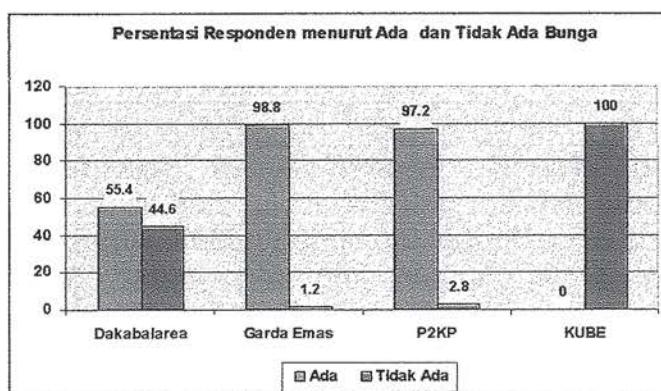
Modal yang diterima bukan merupakan modal hibah, tetapi merupakan modal pinjaman bergulir atau modal yang harus dikembalikan untuk digulirkan/ dipinjamkan kembali pada orang yang sama atau orang lain yang membutuhkan modal usaha untuk membentuk usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Dari Tabel 6.5 terlihat bahwa semua program memberikan dana untuk digulirkan kembali sehingga dana yang dipinjam harus dikembalikan, kecuali pada program KUBE ada 1 orang penerima program yang mempunyai persepsi bahwa dana tersebut tidak dikembalikan.

Tabel 6.5. Sebaran Responden menurut Ya atau Tidak Kembali Modal yang Dipinjam

Program	Ya		Tidak	
	n	%	n	%
Dakabalaera	60	100.00	0	0.00
Garda Emas	82	100.00	0	0.00
P2KP	72	100.00	0	0.00
Program Kube	71	98.61	1	1.39
Semua Program	285	99.65	1	0.35

Bunga. Tidak semua program menerapkan sistem bunga dalam pengembalian modal usaha, program yang tidak menerapkan sistem bunga pada pengembalian modal adalah program KUBE (Gambar 5.8). Dari Gambar 5.8 terlihat bahwa terdapat perbedaan persepsi tentang ada tidaknya bunga. Pada

program Garda Emas dan P2KP sebagian besar (98.8 % dan 97.2%) penerima program menyatakan ada bunga dari modal yang harus dikembalikannya, tetapi ada 1.2% pada program Garda Emas dan 2.8% pada program P2KP yang mengatakan bahwa tidak ada bunga dalam pengembalian modalnya. Perbedaan persepsi terbesar mengenai ada tidaknya bunga terdapat pada penerima program Dakabalare, 55.4% menyatakan ada bunga dan 44.6 % menyatakan tidak ada bunga pada setiap pengembalian modal usaha.



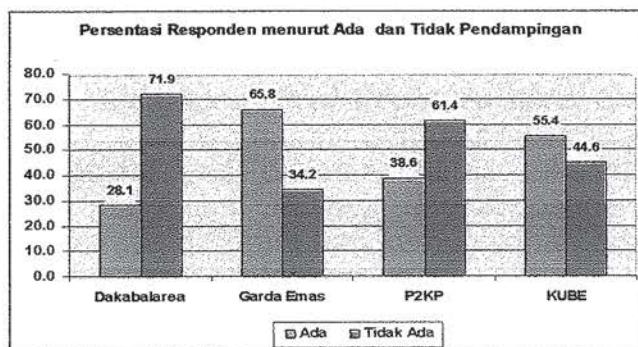
Gambar 6.8 Persentase Responden menurut Ada Tidaknya Bunga

Besarnya bunga modal usaha berbeda antar program, bahkan terdapat perbedaan juga antar penerima program (Tabel 6.6). Dari Tabel 6.6 terlihat bahwa bunga modal usaha pada program Dakabalarea dan Garda Emas berkisar antara 1% hingga 3%. Sedangkan bunga modal usaha pada program P2KP berkisar antara 1% hingga 2%.

Tabel 6.6. Statistik Persen Bunga dari Modal (persen)

Program	Persen Bunga dari modal(%)				
	n	mean	std	min	max
Dakabalarea	31	1.8	0.5	1	3
Garda Emas	80	1.9	0.5	1	3
P2KP	69	1.6	0.2	1	2
Program Kube	0	0	0	0	0
Semua program	181	1.8	0.4	1	3

Proses Pendampingan. Pendampingan merupakan salah satu usaha untuk mempercepat proses keberhasilan usaha penerima program atau mengurangi risiko kegagalan usaha. Pendampingan biasanya dilakukan pada awal usaha sampai cicilan lunas biasanya 10 bulan. Semua program baik itu program Dakabalarea, Garda Emas, P2KP maupun KUBE mengadakan pendampingan. Namun pendampingan ini tidak dirasakan oleh semua penerima program (Gambar 6.9). Dari Gambar 5.9 terlihat, bahwa lebih dari separuh penerima program pada program Garda Emas dan KUBE mendapat pendampingan usaha yaitu masing-masing 65.79% dan 55.38%. Sebaliknya pada program Dakabalarea dan P2KP yang tidak mendapat pendampingan proporsinya lebih besar dibanding yang mendapat pendampingan. Yang mendapat pendampingan pada program Dakabalarea dan P2KP masing-masing hanya sebesar 28.07% dan 38.57%. Sebenarnya berdasarkan juknis masing-masing program, bahwa seluruh program melakukan pendampingan. Bentuk pendampingan yang diberikan setiap program hampir sama yaitu berupa bimbingan pembuatan proposal dan manajemen usaha.



Gambar 6.9 Persentase Responden menurut Ada Tidaknya Pendampingan

Lamanya pendampingan setiap program berbeda, mulai dari hanya 1 bulan sampai dengan 18 bulan dengan rataan 8.6 ± 4.2 bulan (Tabel 6.7). Dari Tabel 6.7 terlihat bahwa program P2KP merupakan program dengan pendampingan usaha yang terlama, dari mulai 12 bulan sampai dengan 18 bulan dengan rataan lama pendampingan 12.2 ± 1.2 bulan. Menyusul program Dakabalarea 6-12 bulan, KUBE 1-12 bulan dan Garda Emas 1-12 bulan. Rataan lama pendampingan untuk masing-masing program Dakabalarea,

KUBE dan Garda Emas adalah sebesar 10.4 ± 1.5 bulan, 9.8 ± 1.5 bulan dan 5.2 ± 4.6 bulan.

Tabel 6.7. Statistik Lama pendampingan Penerima program

Program	Lama pendampingan (bulan)				
	n	mean	std	min	max
Dakabalaera	16	10.4	1.5	6	12
Garda Emas	50	5.2	4.6	1	12
P2KP	27	12.2	1.2	12	18
Program Kube	36	9.8	1.5	1	12
Semua program	129	8.6	4.2	1	18

Pengembalian modal. Modal yang diberikan dari setiap program semuanya harus dikembalikan untuk digulirkan kembali pada orang lain yang membutuhkan atau dipinjam kembali oleh orang yang telah lunas dalam pengembalian modal yang dipinjamnya pada awal program. Dari Tabel 6.8 terlihat bahwa seluruh penerima program baik dari program Dakabalaera, Garda Emas maupun P2KP menyatakan bahwa modal usaha yang diterimanya harus dikembalikan, kecuali ada 1 penerima modal usaha dari program KUBE yang menyatakan bahwa modal usaha tersebut tidak harus dikembalikan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tidak sampainya informasi pada orang tersebut. Dari data ini terlihat bahwa hampir semua penerima program tahu bahwa modal usaha yg dipinjam harus dikembalikan untuk digulirkan pada yang lain. Adanya tingkat pengembalian yang rendah pada beberapa program ada kemungkinan disebabkan oleh bangkrutnya usaha yang dijalankannya.

Tabel 6.8. Sebaran Responden menurut Ya atau Tidak Kembalikan Modal

Program	Ya		Tidak	
	n	%	n	%
Dakabalaera	60	100.00	0	0.00
Garda Emas	82	100.00	0	0.00
P2KP	72	100.00	0	0.00
Program Kube	71	98.61	1	1.39
Semua Program	285	99.65	1	0.35

Lama pengembalian modal usaha paling cepat dikembalikan dalam 5 bulan, dan pengembalian yang paling lama 18 bulan Tabel 6.9. Dari Tabel 6.9 terlihat bahwa lama pengembalian modal pada program Dakabalarea dan KUBE mulai dari 10 bulan sampai 12 bulan namun dengan rataan lama pengembalian yang berbeda yaitu masing-masing 11.5 ± 0.9 bulan dan 10 ± 0.2 bulan. Rataan pengembalian modal yang paling lama ada pada program P2KP yaitu 11.8 ± 3.1 bulan, dan rataan pengembalian modal yang paling cepat ada pada program Garda Emas yaitu 9.4 ± 1.4 bulan.

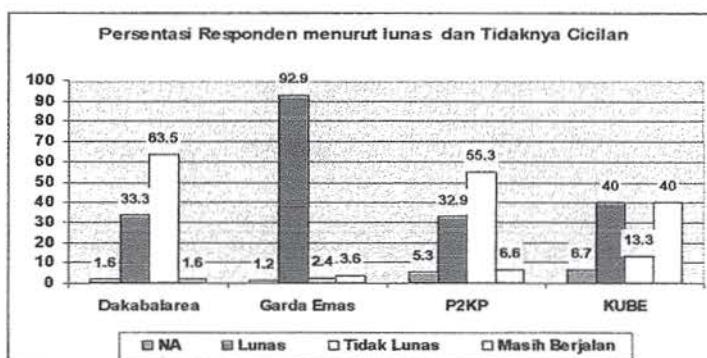
Tabel 6.9 Statistik Lama Bulan Pengembalian Modal

Program	Bulan Pengembalian (bulan)				
	n	mean	std	min	max
Dakabalarea	60	11.5	0.9	10	12
Garda Emas	82	9.4	1.4	5	12
P2KP	72	11.8	3.1	10	18
Program Kube	71	10.0	0.2	10	12
Semua program	285	10.6	2.0	5	18

Dari banyaknya yang mengetahui bahwa modal usaha harus dikembalikan, maka terlihat dari Gambar 6.10, sebagian besar penerima manfaat program mengembalikan modal usaha yang dipinjamnya. Namun karena banyak kendala yang dihadapi penerima program dalam menjalankan usahanya terutama keadaan ekonomi nasional yang tidak stabil, sehingga banyak dari penerima program yang tidak lunas atau tidak dapat mengembalikan modal usaha yang dipinjamnya. Bila dilihat dari keseluruhan program (Gambar 6.10) terlihat bahwa ada 31,5 % yang tidak lunas. Bila dilihat dari masing-masing program, maka penerima manfaat program yang banyak tidak melunasi modal yang dipinjamnya terdapat pada program Dakabalarea yaitu 63,5% dari seluruh penerima program, dan program P2KP sebesar 55,3%. Bila dilihat dari banyaknya yang berhasil mengembalikan modal usaha yang dipinjamnya, maka tingkat pengembalian terbesar ada pada program Garda emas 92,9 % menyusul KUBE 80% (terdiri dari 40% lunas ditambah 40% masih berjalan dan dalam kondisi melunasi sesuai waktu yang ditentukan dalam perjanjian awal).

Berbagai alasan tidak lunas pengembalian modal dikemukakan oleh penerima program (Tabel 6.10). Dari Tabel 6.10

terlihat bahwa usaha bangkrut merupakan alasan yang banyak dikemukakan oleh penerima program (63%), menyusul alasan bahwa hasil usahanya hanya cukup untuk makan (11%), Tidak ditagih (9.6%), gagal panen, modal dipakai hajat, dan macet dianggota masing-masing 4.1%.



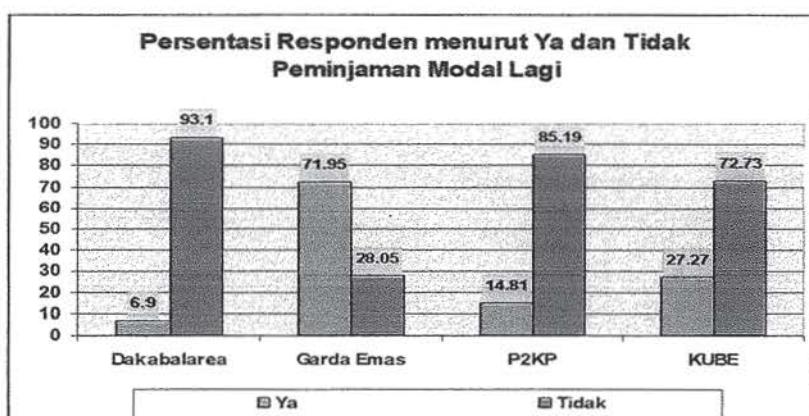
Gambar 6.10. Persentase Responden menurut Lunas Tidaknya Cicilan Modal Bergulir

Tabel 6.10 Jenis alasan tidak lunas pengembalian modal usaha

No	Jenis Alasan	n	%
1	Bangkrut	46	63.0
2	Gagal panen	3	4.1
3	Hanya cukup buat makan	8	11.0
4	Kalah bersaing	1	1.4
5	Macet di anggota	3	4.1
6	Modal habis dipakai hajat pernikahan	3	4.1
7	Modal habis terbawa banjir	1	1.4
8	Penurunan penjualan	1	1.4
9	Tidak ditagih	7	9.6
Total		73	100

Penerimaan modal lain. Penerima program yang telah lunas pengembalian modal usaha, maka mereka boleh mengajukan peminjaman modal lagi pada program yang sama atau pada program lainnya. Namun hanya sedikit yang melakukan pemungjaman modal kembali, yaitu dari keseluruhan penerima program hanya sekitar 34.87 % yang mengajukan peminjaman

modal usaha lagi (Gambar 6.11). Dari Gambar 6.11 terlihat bahwa pada masing-masing program baik itu pada program Dakabalarea, P2KP maupun KUBE proporsi yang meminjam modal lagi lebih kecil dibandingkan yang tidak meminjam modal lagi yaitu masing-masing hanya 6.90%, 14.81% dan 27.27%. Tetapi sebaliknya pada program Garda Emas. Pada program Garda Emas sebagian besar (71.95%) penerima program melakukan peminjaman kembali modal usaha. Tingginya peminjaman kembali modal usaha pada program Garda Emas salah satunya disebabkan oleh tingginya tingkat pengembalian modal pertama dari penerima program yaitu mencapai 92.9%.



Gambar 6.11. Persentase Responden menurut Ya Tidaknya Peminjaman Modal Lagi

Modal usaha yang diterima kembali besarnya antara Rp 120.000 hingga Rp 6.500.000, dengan rataan Rp $1.363.600 \pm 9.401.32.9$ (Tabel 6.11). Bila dibandingkan dengan rataan modal yang diterima pertama yaitu Rp $1.113.934$, maka rataan modal usaha yang diterima pada peminjaman kedua lebih besar.

Dari Tabel 5.11 terlihat bahwa rataan peminjaman modal usaha terbesar ada pada program Dakabalarea yaitu Rp $2.500.000 \pm 707.106.8$, dengan kisaran peminjaman antara Rp $2.000.000$ sampai Rp $3.000.000$.

Tabel 6.11. Statistik Besarnya Modal Kedua yang Diterima

Program	Modal yang diterima sekarang (Rp)				
	n	mean	std	min	max
Dekabalaera	63	2500000	707106.8	2000000	3000000
Garda Emas	84	1531930	1036704	120000	6500000
P2KP	76	743750	467086.3	450000	1500000
Program Kube	75	500000	0	500000	500000
Semua program	298	1363600	1009760	120000	6500000
Semua program	272	1113934	940132.9	200000	6000000

Sedangkan rataan peminjaman modal usaha terkecil ada pada program KUBE yaitu Rp 500.000, disamping modal yang diberikan untuk peminjaman kedua besarnya sama untuk semua peminjam yaitu Rp 500.000,-.. Lama cicilan modal kedua dapat dilihat pada Tabel 6.12

Tabel 6.12. Statistik Lama Cicilan Modal Kedua yang Diterima Kedua

Program	Lama cicilan modal yg diterima sekarang (bulan)				
	n	mean	std	min	max
Dekabalaera	2	11	1.4	10	12
Garda Emas	57	9.3	2.7	5	24
P2KP	8	10.5	0.92	10	12
Program Kube	9	10	0	10	10
Semua program	76	9.6	2.4	5	24

Lama pengembalian cicilan berkisar antara 5 – 24 bulan dengan rataan 9.6 ± 2.4 bulan (Tabel 5.12). Pada program KUBE lama cicilan seragam untuk semua peminjam yaitu masing-masing 10 bulan. Sedangkan pada program Garda Emas terdapat perbedaan lama cicilan antar peminjam yang cukup besar yaitu mulai dari 5 bulan hingga 24 bulan. Hal ini dimungkinkan karena variasi pinjaman nya juga cukup tinggi yaitu mulai dari Rp 120000 sampai Rp 6000000,-

Pada pelunasan modal kedua, maka terlihat bahwa tingkat keberhasilannya cukup tinggi yaitu mencapai 85.7% yang mengembalikan modal sesuai kesepakatan awal yaitu 50% sudah lunas dan 35.7% masih berjalan namun cicilan juga dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan (Tabel 6.13). Tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibanding pada awal peminjaman, dimungkinkan karena peminjaman yang kedua diberikan pada orang yang

memang bertanggung jawab melunasi peminjaman modal pertama serta usahanya masih tetap berjalan.

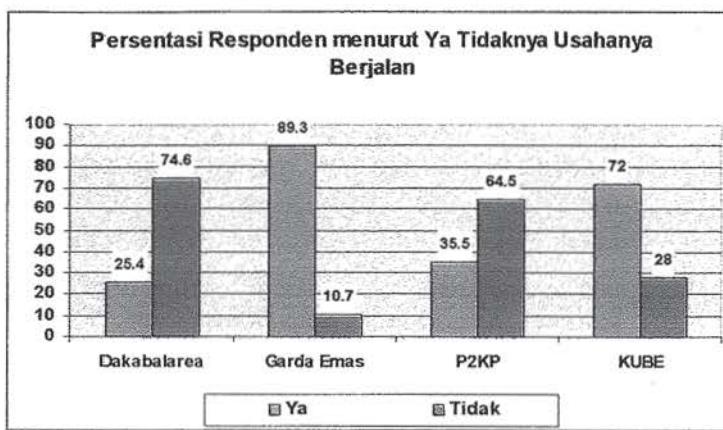
Tabel 6.13. Sebaran Responden menurut Tingkat pelunasan modal usaha

No	Program	n	%
1	Tidak ada keterangan	7	8.3
2	Lunas	42	50.0
3	Tidak Lunas	5	6.0
4	Masih berjalan	30	35.7
5	Semua program	84	100

Dari 6% yang cicilannya tidak lunas, alasan yang dikemukakan adalah produk mereka atau toko mereka kalah bersaing, dan juga karena tidak ada yang nagih. Kaitidak mengembalikan cicilan dengan alasan tidak ada yang nagih menunjukkan kesadaran yang kurang dari peminjam untuk mengembalikan modal.

6.2.2. Output

Keberlanjutan usaha. Output dari suatu usaha dengan penambahan modal usaha adalah semakin baik jalannya usaha, berkembangnya jenis usaha, serta meningkatnya pendapatan atau omset. Dari Gambar 6.12 terlihat bahwa sebagian besar (57.70%) penerima program usahanya masih berjalan. Namun tingkat keberhasilan ini tidak merata untuk semua program. Usaha Penerima program yang masih berjalan, proporsi terbanyak ada pada penerima program Garda Emas yaitu 89.3 %, menyusul usaha penerima program KUBE 72.0 %, P2KP 35.5 %, dan yang paling sedikit usahanya yang berhasil ada pada penerima program Dakabalaera yaitu hanya 25.4 %.



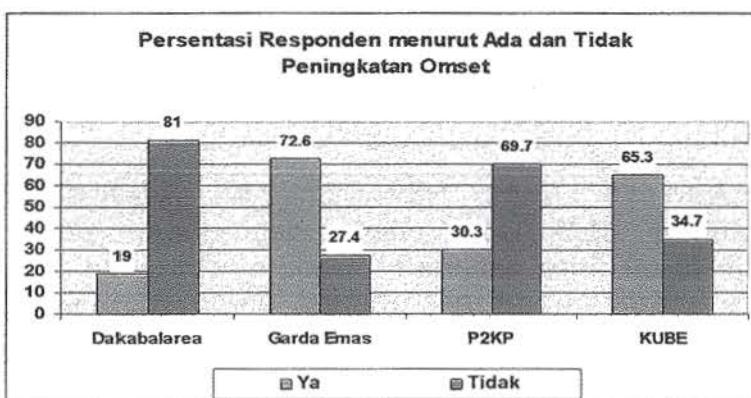
Gambar 6.12. Persentase Responden menurut Ya Tidak Usahanya Berjalan

Omset. Omset penerima program sebelum mendapat pinjaman modal usaha berkisar antara Rp 0 sampai Rp 25000000,- dengan rataan $1.631.409 \pm 3.673.248$ (Tabel 6.14). Omset Rp 0 merupakan omset dari usaha yang sudah tidak berjalan. Dari Tabel 5.14 terlihat bahwa penerima program Garda Emas mempunyai rataan omset paling tinggi dibanding omset penerima program lainnya yaitu Rp $2.242.560 \pm 4.845.397$, dengan kisaran omset antara Rp 0 hingga Rp 15.000.000. Menyusul rataan omset program KUBE sebesar Rp $1.749.067 \pm 3.285.169$, dengan kisaran omset antara Rp 0 hingga Rp 25.000.000,-. Kemudian program Balarea dengan rataan omset sebesar Rp $1.432.698 \pm 4.845.397$, dengan kisaran antara Rp 0 hingga Rp 25.000.000,- dan yang paling kecil rataan omset terdapat pada program P2KP yaitu Rp $1.004.539 \pm 3.906.896$, dengan kisaran omset antara Rp 0 hingga Rp 12.000.000,-.

Tabel 6.14. Statistik besarnya Omset

Program	Omset				
	n	mean	std	min	max
Dakabalaera	63	1432698	4845397	0	25000000
Garda Emas	84	2242560	3906896	0	15000000
P2KP	76	1004539	2370433	0	12000000
Program Kube	75	1749067	3285169	0	20000000
Semua program	298	1631409	3673248	0	25000000

Keberhasilan intervensi suatu program adalah apabila intervensi yang dilakukan memberikan hasil yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Dengan adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini, hampir separuhnya (48.7%) penerima program merasakan manfaatnya yaitu dengan meningkatnya omset/ keuntungan dari usaha yang dijalankannya (Gambar 6.13).



Gambar 6.13. Persentase Responden menurut Ada Tidaknya Peningkatan Omset

Dari Gambar 6.13 terlihat bahwa peningkatan omset dirasakan oleh sebagian besar penerima program Garda Emas dan KUBE yaitu masing-masing 72.6 % dan 65.3 %, menyusul P2KP (30.3 %) dan yang paling sedikit ada pada program Dakabalarea hanya 19.0% penerima program yang meningkat omsetnya setelah diintervensi dengan modal usaha.

Omset setelah adanya pinjaman modal bervariasi antar program maupun antar penerima program. Dari semua program omset berkisar antara Rp 0 sampai Rp 45000000 (Tabel 6.15). Rp 0 merupakan omset dari usaha yang tidak berjalan. Dari Tabel 5.28 terlihat bahwa setelah ada pinjaman modal usaha, maka rataan omset penerima program dari seluruh program meningkat dari Rp 1631409 menjadi Rp 2291700. Demikian pula terjadi peningkatan omset untuk setiap program. Rataan omset pada program Dakabalarea meningkat dari Rp 1432698 menjadi Rp 2065397, pada program Garda Emas meningkat dari Rp 2242560 menjadi Rp 3608333, pada program P2KP meningkat dari Rp 1004539 menjadi Rp 1274013, dan pada program KUBE

meningkat dari Rp 1749067 menjadi Rp 2035000. Peningkatan omset terbesar ada pada program Dakabalarea yaitu sebesar Rp 632698.

Tabel 6.15 Statistik peningkatan omset

Program	Omset		
	Sebelum	Sesudah	Peningkatan
Dakabalarea	1432698	2065397	632698
Garda Emas	2242560	3608333	1365774
P2KP	1004539	1274013	269474
Program Kube	1749067	2035000	285933
Semua program	1631409	2291700	660291

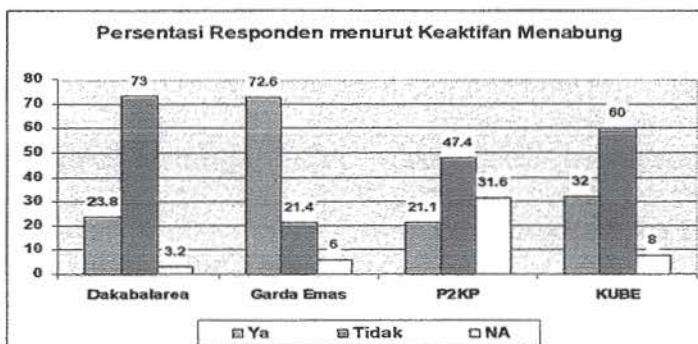
Keuntungan. Meningkatnya omset diharapkan dapat meningkatkan keuntungan. Dari Tabel 6.16 terlihat bahwa keuntungan penerima program berkisar dari Rp 0 hingga Rp 4500000, dengan rataan keuntungan Rp 449882.6 ± 748218 . Rataan keuntungan tertinggi diterima oleh penerima program dari program Garda Emas yaitu Rp 733869 ± 855260 , menyusul dari program KUBE Rp 448133 ± 525037 , program P2KP Rp 282237 ± 632651 , dan rataan keuntungan terkecil diterima oleh penerima program Dakabalarea Rp 275556 ± 845433 .

Berdasarkan hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan bahwa tidak ada hubungan nyata antara besarnya modal yang diberikan dengan besarnya keuntungan usaha (Lampiran 3), juga tidak ada hubungan nyata antara besarnya modal dengan omset (Lampiran 5) namun ada hubungan nyata antara besarnya omset dengan keuntungan (Lampiran 4). Demikian juga tidak ada hubungan antara besarnya penerimaan omset dengan besarnya keuntungan yang diterima penerima program.

Tabel 6.16. Statistik Untung

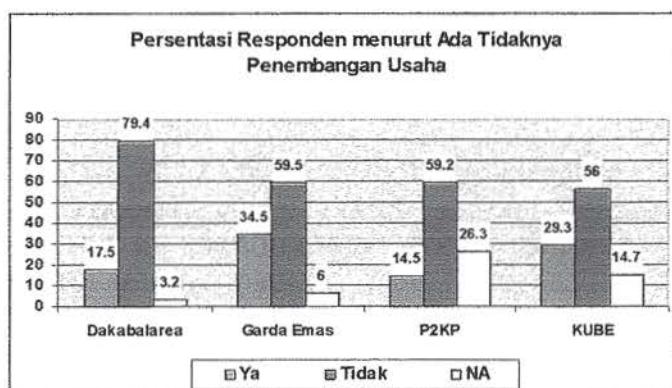
Program	Untung				
	n	mean	std	min	max
Dakabalarea	63	275556	845433	0	4500000
Garda Emas	84	733869	855260	0	4000000
P2KP	76	282237	632651	0	4500000
Program Kube	75	448133	525037	0	3000000
Semua program	298	449882.6	748218	0	4500000

Tabungan. Sebaran responden menurut ada tidaknya tabungan dapat dilihat pada Gambar 6.15. Dari Gambar 6.15 terlihat bahwa hanya 38.9% penerima program mempunyai tabungan. Pada program Garda Emas, sebagian besar (72.6%) penerima program mempunyai tabungan, sedangkan pada program lainnya seperti pada program Dakabalarea, P2KP maupun KUBE penerima program yang punya tabungan proporsinya kurang dari 50% yaitu masing-masing sebesar 23.8%, 21.1% dan 32.0%.



Gambar 6.15. Persentase Responden menurut Aktif Tidaknya Menabung

Pengembangan Usaha. Seorang pengusaha yang berhasil biasanya selalu dapat melihat peluang usaha, dan akan melakukan pengembangan usaha bila kesempatan itu ada. Sebaran responden berdasarkan ada tidaknya pengembangan usaha dapat dilihat pada Gambar 6.16.



Gambar 6.16. Persentase Responden menurut Ada Tidaknya Pengembangan Usaha

Dari Gambar 6.16 terlihat bahwa 24.5 % penerima program melakukan pengembangan usaha, baik itu pengembangan jenis usaha maupun pengembangan jenis produk. Proporsi terbesar penerima program yang melakukan pengembangan usaha ada pada program Garda Emas yaitu (34.5%), menyusul penerima program dari KUBE (29.3%), Dakabalarea (17.5%) dan yang paling sedikit pada program P2KP (14.5%).

6.3 Indikator Keberhasilan Program Kualitatif

Indikator keberhasilan program dilihat dari beberapa aspek yaitu adanya 1) peningkatan pendapatan, 2) adanya pengembangan Usaha, 3) adanya peningkatan jumlah tenaga kerja, 4) punya tabungan dan masih aktif menabung, 5) bisa mengembalikan cicilan, dan 6) usahanya masih berjalan sampai saat ini. Sebaran penerima program berdasarkan ke enam aspek diatas dapat dilihat pada Tabel 6.17.

Tabel 6.17. Sebaran Responden menurut Variabel Indikator Keberhasilan

Program	A	B	C	D	E	F
	%	%	%	%	%	%
Dakabalarea	12.0	17.5	12.7	19.0	25.4	22.2
Garda Emas	61.0	38.1	8.3	76.2	84.5	79.8
P2KP	23.0	14.5	1.3	15.8	21.1	27.6
Program Kube	49.0	30.7	0.0	29.3	44.0	42.7
Semua Program	14.5	25.8	5.4	36.9	45.6	45.0

Keterangan: A = adanya peningkatan pendapatan
B = adanya pengembangan usaha
C = adanya penambahan jumlah tenaga kerja
D = masih aktif menabung
E = bisa mengembalikan cicilan
F = usahanya masih berjalan

Dari Tabel 6.17 terlihat bahwa program Garda Emas mempunyai proporsi yang tinggi untuk berbagai indikator keberhasilan. Hal ini menunjukkan bahwa program Garda Emas secara kualitatif mempunyai tingkat keberhasilan paling tinggi dibanding program lainnya.

BAB VII

COST EFFECTIVENESS PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Program **Dakabalarea** adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang paling sedikit penerima manfaatnya yaitu hanya sebanyak 329 orang. Bagi yang dapat menjalankan, program ini mampu memberikan tambahan pendapatan sebesar Rp 1021176/bulan. Tambahan pendapatan ini merupakan tambahan tertinggi yang dapat diberikan dibandingkan dengan tiga program lainnya. Modal yang digunakan oleh semua penerima ditambah biaya operasional adalah terkecil kedua yaitu sebesar Rp 776.400.000. Namun bila dilihat dari unit costnya, maka program ini yang terbesar unit costnya yaitu sebesar Rp 2.783.539. Usia penerima program ini tergolong paling tua dibandingkan dengan rata-rata usia penerima program lainnya yaitu 48.7 tahun. Keberhasilan program ini adalah yang paling rendah seperti ditunjukkan oleh peluang keberhasilannya hanya sebesar 0.2698. Program ini sampai usia penerima berumur 65 tahun diperkirakan dapat memberikan PDB untuk Kota Bogor sebesar **Rp 11,309,944,392**, nilai ini adalah nilai terendah dibandingkan program lainnya. Program Dakabalarea tergolong efektif karena nilai **1/CE=14.56>1** seperti dapat dilihat pada Tabel 36. Hal ini menunjukkan bahwa setiap **Rp 1 rupiah** yang digunakan melalui program Dakabalarea dapat memberikan **Rp 16.72 bagi PDB** dalam rentang 16 tahun atau memberikan **Rp 1.0450/tahun**. Namun program ini adalah program yang **paling rendah efektivitasnya**.

Program **Garda Emas** adalah program pemberdayaan ekonomi terkecil kedua penerimanya yaitu sebanyak 553 orang. Bagi yang dapat menjalankan, program ini mampu memberikan tambahan pendapatan sebesar Rp 456.250/bulan. Tambahan pendapatan ini merupakan tambahan terkecil yang dapat diberikan dibandingkan dengan tiga program lainnya. Modal yang digunakan oleh semua penerima ditambah biaya operasional adalah terkecil yaitu sebesar Rp 534.350.000. Namun bila dilihat dari unit costnya, maka program ini merupakan unit cost kedua terbesar unit costnya dibanding 3 program lainnya yaitu sebesar

Rp 966.274. Usia penerima program ini adalah termuda dibandingkan dengan rata-rata usia penerima program lainnya yaitu 43 tahun. Keberhasilan program ini adalah yang paling tinggi seperti ditunjukkan oleh peluang keberhasilannya hanya sebesar 0.8929. Program ini sampai usia penerima berumur 65 tahun diperkirakan dapat memberikan PDB untuk Kota Bogor sebesar **Rp 32,979,338,875**, nilai ini adalah nilai kedua terendah dibandingkan program lainnya, namun hampir 3 kali PDB yang dpt diberikan oleh Dakabalaera. Program Garda Emas sangat efektif karena nilai **1/CE=61.72>1** seperti dapat dilihat pada Tabel 36. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp 1 rupiah yang digunakan melalui program **Garda Emas dapat memberikan Rp 61.72 bagi PDB** dalam rentang 22 tahun atau memberikan **Rp 2.8054/tahun**. Program ini adalah program yang sangat efektif, namun menempati urutan ketiga dibandingkan tiga program lainnya.

Program **P2KP** adalah program pemberdayaan ekonomi terbesar penerimanya yaitu sebanyak 23.523 orang. Bagi yang dapat menjalankan, program ini mampu memberikan tambahan pendapatan sebesar Rp 794.444/bulan. Tambahan pendapatan ini merupakan tambahan terbesar. Modal yang digunakan oleh semua penerima ditambah biaya operasional adalah terbesar yaitu sebesar Rp 12.058.154.730. Namun bila dilihat dari unit costnya, maka program ini merupakan unit cost kedua terkecil unit costnya dibanding 3 program lainnya yaitu sebesar Rp 512.611. Usia penerima program ini adalah termuda kedua dibandingkan dengan rata-rata usia penerima program lainnya yaitu 44.4 tahun. Keberhasilan program ini adalah terendah kedua seperti ditunjukkan oleh peluang keberhasilannya hanya sebesar 0.3553. Program ini sampai usia penerima berumur 65 tahun diperkirakan dapat memberikan PDB untuk Kota Bogor sebesar **Rp 942,374,722,073**, nilai ini adalah nilai terbesar. Program P2KP sangat efektif karena nilai **1/CE=78.15>1** seperti dapat dilihat pada Tabel 36. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp 1 rupiah yang digunakan melalui program **P2KP dapat memberikan Rp 78.15 bagi PDB** dalam rentang 21 tahun atau memberikan **Rp 3.7215/tahun**. Program ini adalah program yang sangat efektif, dan menempati urutan kedua efektivitasnya dibandingkan tiga program lainnya

Program **Kube** adalah program pemberdayaan ekonomi terbesar kedua penerimanya yaitu sebanyak 11.210 orang. Bagi yang dapat menjalankan, program ini mampu memberikan tambahan pendapatan sebesar Rp 624.259/bulan. Tambahan pendapatan ini merupakan tambahan terkecil kedua yang dapat diberikan dibandingkan dengan tiga program lainnya. Modal yang digunakan oleh semua penerima ditambah biaya operasional adalah terbesar yaitu sebesar Rp 2.550.635.725. Namun bila dilihat dari unit costnya, maka program ini merupakan unit cost yang terkecil unit costnya dibanding 3 program lainnya yaitu sebesar Rp 227.532. Usia penerima program ini adalah tertua kedua dibandingkan dengan rata-rata usia penerima program lainnya yaitu 47.9 tahun. Keberhasilan program ini adalah terbesar kedua seperti ditunjukkan oleh peluang keberhasilannya hanya sebesar 0.7200. Program ini sampai usia penerima berumur 65 tahun diperkirakan dapat memberikan PDB untuk Kota Bogor sebesar **Rp 645,218,934,829** nilai ini adalah nilai kedua terbesar dibandingkan program lainnya. Program Kube sangat efektif karena nilai **1/CE=252.96>1** seperti dapat dilihat pada Tabel 36.. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp 1 rupiah yang digunakan melalui program **Kube dapat memberikan Rp 252.96 bagi PDB** dalam rentang 17 tahun atau memberikan **Rp 14.8802/tahun**. Program ini adalah program yang sangat efektif, dan menempati urutan pertama efektivitasnya.

Tabel 7.1. Evaluasi Program Perbaikan Ekonomi Masyarakat

Variabel	Kode	Program			
		Dakabalaera	Garda Emas	P2KP	Kube
		i=1	i=2	i=3	i=4
Rataan Tambahan Pendapatan Rp/bln akibat menerima program	K _i	1021176	456250	794444	624259
Ukuran sampel		63	84	76	75
Jumlah yang usahanya masih berjalan menurut responden dan petugas		17	75	27	54
Peluang berhasil	p _i	0.2698	0.8929	0.3553	0.7200
Rataan Umur (th) saat menerima program		48.7	43.0	44.4	47.9
Rataan Umur (bulan) saat menerima program		584	516	532	575
Usia Tidak produktif lagi atau pensium (th)		65	65	65	65
Usia Tdk produktif lagi atau pensium (thn)		780	780	780	780
Rataan Lama usaha sampai pensium (bln)	b _i	196	264	248	205
Bunga Bank per bulan	r _i	0.05	0.05	0.05	0.05
Total Penggunaan dana (Rp)	D _i	676,400,000	534,350,000	12,058,154,730	2,550,635,725
banyaknya Penerima program (orang)	N _i	243	553	23523	11210
Produk Domestik Bruto yang dapat diselamatkan (PDB) Rp	PDB _i	11,309,944,392	32,979,338,875	942,374,722,073	645,218,934,829
Cost Effectiveness Program	CE _i	0.068648	0.016203	0.012795	0.003953
Nilai PDB yang dapat diselamatkan oleh Rp 1 program	1/CE _i	14.567162	61.718609	78.152482	252.963968
Rataan Rentang Waktu (tahun) yang dijalankan penerima		16	22	21	17
Nilai PDB yang dapat diselamatkan oleh Rp 1 program per tahun		0.9104	2.8054	3.7215	14.8802

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

8.1. Kesimpulan

1. Unit cost pada program Kube adalah unit cost yang terkecil disbanding unit cost pada program lainnya yaitu sebesar Rp 227 532, artinya dalam mengentaskan kemiskinan satu rumah tangga/ KK, maka program KUBE harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 227 532. Menyusul unit cost dari P2KP sebesar Rp 512 611, dan Garda Emas sebesar Rp 966 274. Unit Cost terbesar ada pada program Dakabalarea yaitu sebesar Rp 2 7835 39, artinya dalam mengentaskan kemiskinan satu rumah tangga/KK, maka program Dakabalarea harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 2 783 539.
2. Program **Kube** adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang paling efektif. Setiap Rp 1 yang dialokasikan melalui program Kube dapat memberikan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto sebesar Rp 252.96 dalam rentang 17 tahun atau sebesar Rp 14.88/tahun. Program ini sangat efektif untuk peningkatan PDB.
3. Program **P2KP** adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang efektif dan menempati urutan kedua efektivitasnya. Setiap Rp 1 yang dialokasikan melalui program P2KP dapat memberikan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto sebesar Rp 78.15 dalam rentang 21 tahun atau sebesar Rp 3.72/tahun.
4. Program **Garda Emas** adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang efektif dan menempati urutan ketiga efektivitasnya. Setiap Rp 1 yang dialokasikan melalui program Garda Emas dapat memberikan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto sebesar Rp 61.71 dalam rentang 22 tahun atau sebesar Rp 2.81/tahun. Program ini sangat efektif untuk peningkatan pemerataan keuntungan diantara penerima program.
5. Program **Dakabalarea** adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang efektif dan namun efektivitasnya paling rendah. Setiap Rp 1 yang dialokasikan melalui program Dakabalarea hanya memberikan sumbangan

terhadap Produk Domestik Bruto sebesar Rp 16.72 dalam rentang 16 tahun atau sebesar Rp 1.05/tahun.

8.2. Saran

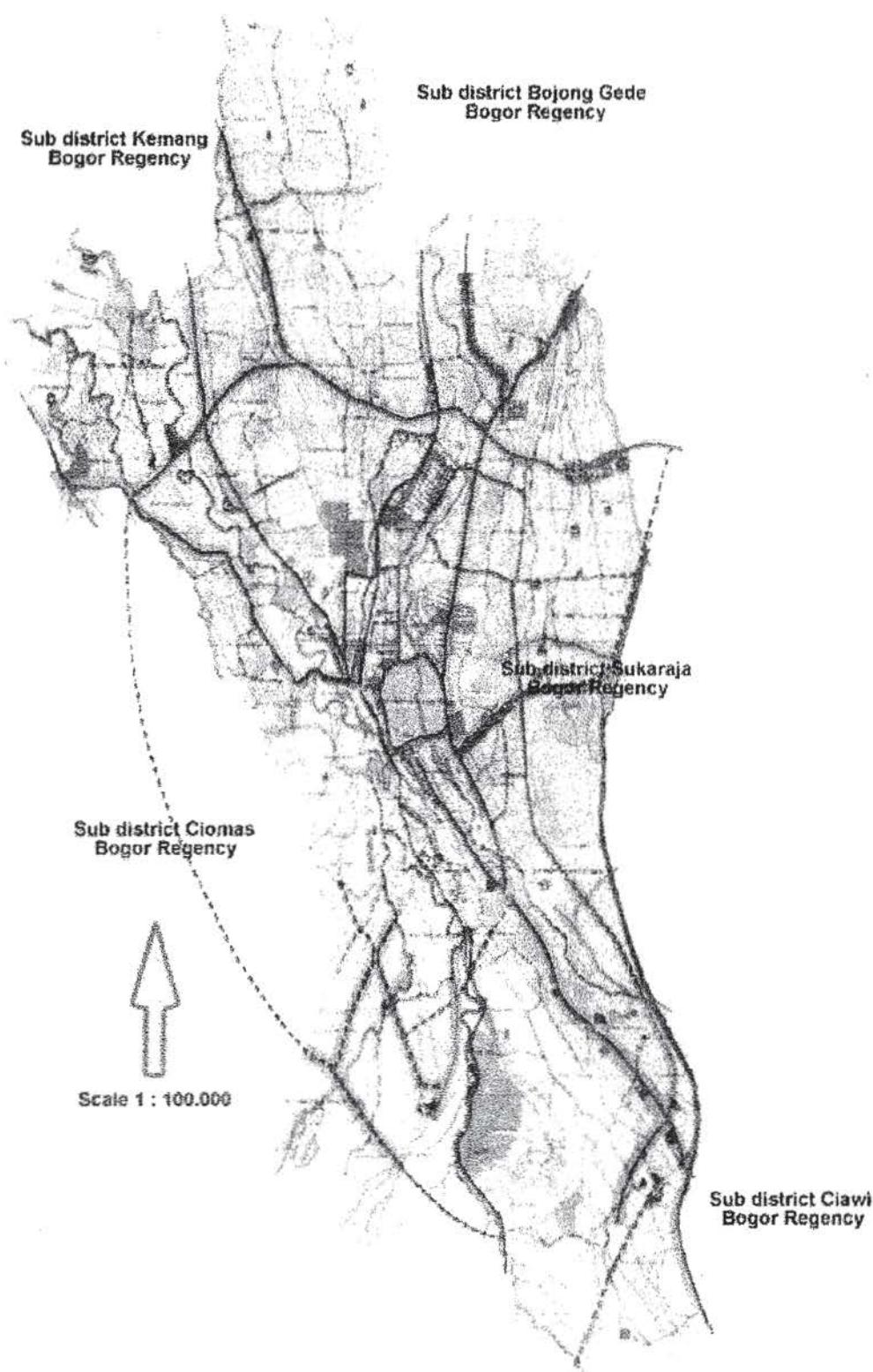
1. Program **Kube, P2KP dan Garda Emas** hendaknya diteruskan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Program Kube dapat diprioritaskan karena memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDB.
2. Program **Dakabala** hendaknya dipertimbangkan lebih dahulu apabila akan diteruskan untuk pemberdayaan masyarakat karena efektivitasnya terendah dan kedua, tingkat keberhasilannya pun terendah. Pertimbangan yang harus dilakukan dalam hal perbaikan mekanisme pergulirannya serta meningkatkan efektifitas pendampingan (jumlah dan frekuensi).
3. Secara langsung tidak ada hubungan antara besar bantuan yang diberikan dengan keuntungan atau peningkatan pendapatan penerima program. Tetapi keberhasilan lebih ke pengelolaan pendampingan dilapangan. Semakin efektif pendampingan maka keberlangsungan usaha penerima program semakin tinggi dan juga semakin baik keuntungan atau peningkatan pendapatan usaha yang dijalankan penerima program.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. 2005. Daftar Penerima KUBE Gakin 2007. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Bogor. Bogor
- Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. 2006. Daftar Penerima KUBE Gakin 2007. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Bogor. Bogor.
- Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. 2007. Daftar Penerima KUBE Gakin 2007. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Bogor. Bogor.
- Dirjen Perumahan dan Pemukiman. 2003. Pedoma Teknis P2KP I tahap II. Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Direktorat Jendral Perumahan dan Pemukiman. Jakarta.
- Hartoyo, Dadang S., Hadi R. Drajat M., Ade M. A., Wiwit W. 2001. Manual PCE, Development of JPS Cost-Effectiveness Framework for Comparison of Alternative Program Component Cost and Impact at District Level. Center for Food and Nutrition Policy Studies. Bogor Agriculture University.
- Kusharto, Clara. Dan Tanziha I. 2000. Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Cianjur. Departemen Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Manusia, Fakultas Pertanian-IPB. Bogor.
- Kusharto, Clara. Dan Tanziha I. 2000. Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Cianjur. Departemen Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Manusia, Fakultas Pertanian-IPB. Bogor.
- Pemerintah Kota Bogor. 2004. Garda Emas (Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat). Bogor.
- Pemerintah Kota Bogor. 2007. Laporan Garda Emas (Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat). Pemerintah Kota Bogor, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bogor. Bogor.
- Pemerintah Kota Bogor. 2004. Laporan Program Dakabalaera. Pemerintah Kota Bogor, Bogor.
- Walpole, ER. 1999. Pengantar Statistika, Penerbit Gramedia, Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Kota Bogor



Lampiran 2. Sebaran responden menurut Kelompok Usaha Dakabalaera

Program	No	Kelompok Usaha	n	%thd program
Dakabalaera	1	Tidak ada keterangan	8	12.7
	2	BMT Iklas	6	9.52
	3	BMT Wasilah	1	1.59
	4	Giat Taruna	8	12.7
	5	kopontren annuroniyah	1	1.59
	6	Koppoten Annuroniyah	5	7.94
	7	KPEK persada	4	6.35
	8	KPEK Persada Kedung Halang	4	6.35
	9	LPED Cilendek timur	15	23.81
	10	LPED Sukasari	11	17.46
Jumlah			63	100

Lampiran 3. Sebaran responden menurut Kelompok Usaha Garda Emas

Program	No	Kelompok Usaha	n	%thd program
garda emas	1	Tidak ada keterangan	18	21.43
	2	catering	3	3.57
	3	dagang	1	1.19
	4	dagang sayuran	1	1.19
	5	Jual handphone	1	1.19
	6	KPEK Barata Ciluar	11	13.1
	7	KPEK Batara ciluar	5	5.95
	8	KPEK purbasari	11	13.1
	9	KPEK Sangkuriang	6	7.14
	10	KPEK serumpun	5	5.95
	11	sandal	1	1.19
	12	sepatu sandal	1	1.19
	13	Wanita Barana	14	16.67
	14	warung makan + minum	2	2.38
	15	warung rokok	1	1.19
	16	warung sembako	3	3.57
Jumlah			84	100

Lampiran 4. Sebaran responden menurut Kelompok Usaha P2KP

Program	No	Kelompok Usaha	n	%thd program
P2KP	1	Tidak ada keterangan	15	19.74
	2	Belut	1	1.32
	3	bengkel	2	2.63
	4	dagang	2	2.63
	5	dagang lele	1	1.32
	6	Ikan asin	1	1.32
	7	Ikan tengiri II	1	1.32
	8	jahit	1	1.32
	9	Jual beli besi tua	3	3.95
	10	kredit barang	1	1.32
	11	KSM bina usaha	2	2.63
	12	KSM harapan motor	2	2.63
	13	KSM karya mandiri	1	1.32
	14	KSM kenanga	1	1.32
	15	KSM LKK 2KDH	1	1.32
	16	KSM manggis	3	3.95
	17	KSM matahari	1	1.32
	18	KSM mentari	1	1.32
	19	KSM tembakau	2	2.63
	20	Ksm. Harapan	3	3.95
	21	Ksm. Hikmah	4	5.26
	22	Ksm. Kamboja	4	5.26
	23	Ksm. Kenanga	1	1.32
	24	Ksm. pinus	4	5.26
	25	mawar	2	2.63
	26	mawar 1	3	3.95
	27	mawar 2	1	1.32
	28	Mitra Mandiri	1	1.32
	29	Okky Snack	3	3.95
	30	Sadewa	3	3.95
	31	sayur	1	1.32
	32	Tani	1	1.32
	33	ternak mandiri	2	2.63
	34	Tukang becak	1	1.32
Jumlah			76	100

Lampiran 5. Sebaran responden menurut Kelompok Usaha KUBE

Program	No	Kelompok Usaha	n	%thd program
KUBE	1	Tidak ada keterangan	25	33.33
	2	Bogor Lake Side	2	2.67
	3	Cikonang kidul	3	4
	4	ciwaringin I	2	2.67
	5	ciwaringin II	1	1.33
	6	dagang	1	1.33
	7	dagang baso dan gorengan	1	1.33
	8	dagang bendera	1	1.33
	9	Euphorbia	3	4
	10	Gorengan	2	2.67
	11	ibu indri	1	1.33
	12	ibu nuni	1	1.33
	13	ikan hias	1	1.33
	14	jual gorengan	1	1.33
	15	jual sate kambing	1	1.33
	16	jualan lontong	1	1.33
	17	Kamboja	1	1.33
	18	Kube	3	4
	19	kube gakin mandiri	4	5.33
	20	masakan	1	1.33
	21	Mawar	1	1.33
	22	Mekar Sari	1	1.33
	23	Melati	1	1.33
	24	membuat kasar	1	1.33
	25	Menjahit	1	1.33
	26	Nusa Indah	1	1.33
	27	Peking	1	1.33
	28	sembako	1	1.33
	29	UEK-SP sejahtera	5	6.67
	30	walet	6	8
Jumlah			75	100
Total			298	100

Lampiran 6. Hasil korelasi Pearson antara Besarnya Modal yang diberikan dengan keuntungan yang diterima

Correlations

		Keuntungan	Besar Modal
Keuntungan	Pearson Correlation	1	-.018
	Sig. (2-tailed)		.751
	N	298	298
Besar Modal	Pearson Correlation	-.018	1
	Sig. (2-tailed)	.751	
	N	298	298

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 7. Hasil korelasi Pearson antara peningkatan Omset dan keuntungan yang diterima

Correlations

		Omset	Keuntungan
Omset	Pearson Correlation	1	.689(**)
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	297	297
Keuntungan	Pearson Correlation	.689(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	297	298

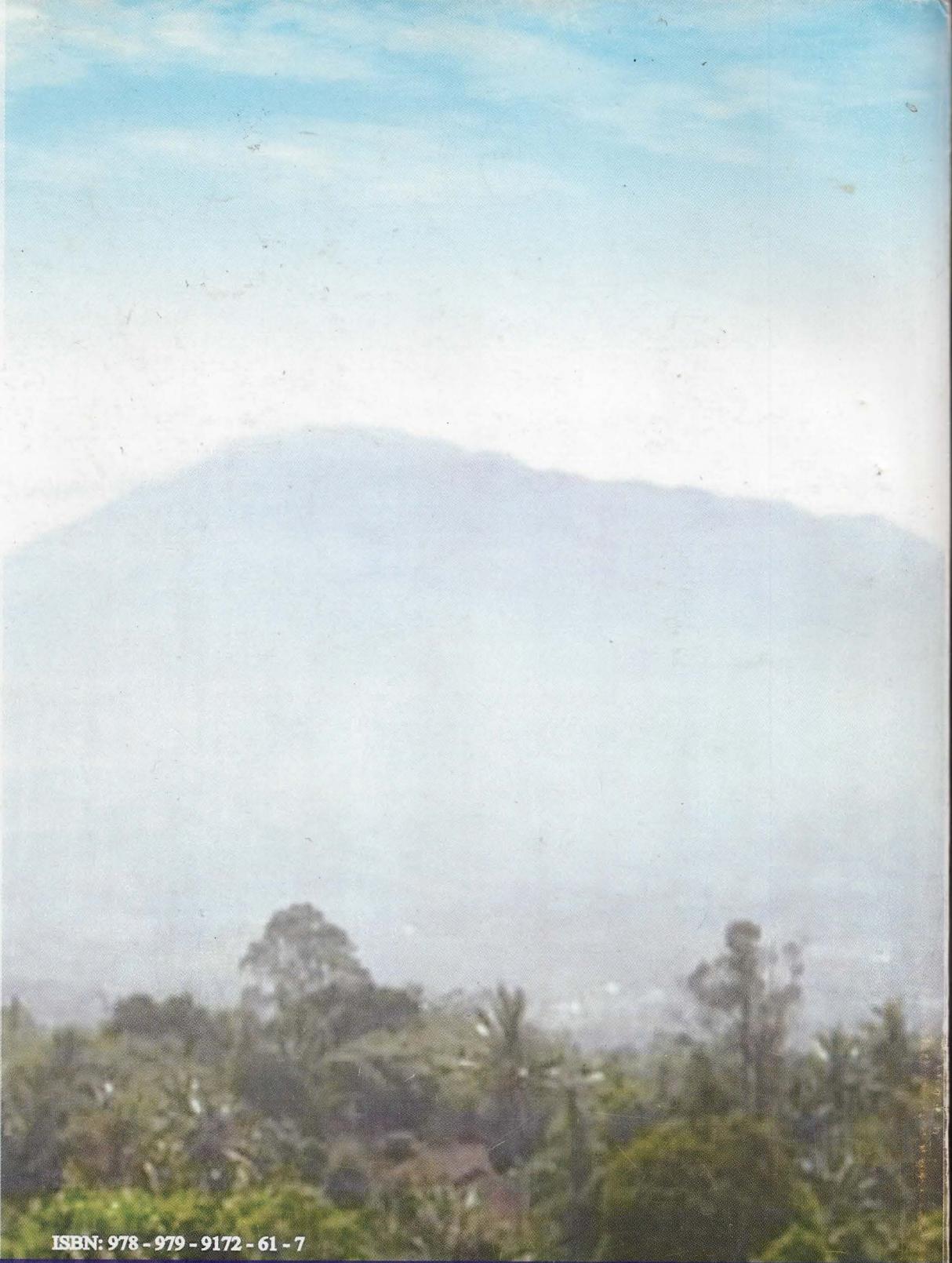
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 8. Hasil korelasi Pearson antara peningkatan Omset dan keuntungan yang diterima

Correlations

		Besar Modal	Peningkatan Omset
Besar Modal	Pearson Correlation	1	.069
	Sig. (2-tailed)		.237
	N	298	297
Peningkatan Omset	Pearson Correlation	.069	1
	Sig. (2-tailed)	.237	
	N	297	297

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



ISBN: 978 - 979 - 9172 - 61 - 7



**DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2009**